

**PROGRAM *SMART CITY* KOTA MAKASSAR
(STUDI PEMANFAATAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* DI KOTA
MAKASSAR)**



YULI ASTUTI

Nomor Stambuk : 105640176913

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PROGRAM *SMART CITY* KOTA MAKASSAR
(STUDI PEMANFAATAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* DI KOTA
MAKASSAR)

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diajukan Oleh:

YULI ASTUTI

Nomor Stambuk : 105640176913

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Program *Smart City* Kota Makassar (Studi Pemanfaatan
CCTV di Kota Makassar)

Nama Mahasiswi : Yuli Astuti

Nomor Stambuk : 105640 176913

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

Mengetahui :

Dekan

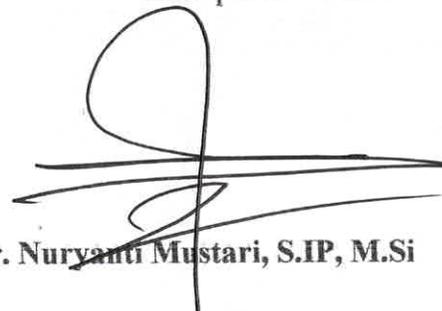
Ketua Jurusan

Fisipol unismuh Makassar

Ilmu pemerintahan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi oleh Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1219/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si (Ketua)
2. Dr. Anwar Parawangi, M.Si
3. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Yuli Astuti

Nomor Stambuk : 10564 0176913

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah karya saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 12 Juli 2018

Yang Menyatakan,


Yuli Astuti

ABSTRAK

YULI ASTUTI 2018. Program *Smart City* Kota Makassar (Studi Pemanfaatan *Closed Circuit Television* di Kota Makassar) (dibimbing oleh Ihyani Malik dan Rudi Hardi)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Program *Smart City* Kota Makassar (Studi Pemanfaatan *Closed Circuit Television* di Kota Makassar). Dan untuk mengatasi berbagai karakteristik inovasi ekosistem oleh semua gagasan *Smart City* diantaranya menjadi Kota hijau, saling berhubungan, terpadu untuk semua lapisan dan bentuk Kota.

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan menjelaskan tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk-bentuk kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Penelitian kualitatif bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diintervensikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut perspektif partisipan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program *Smart City* Kota Makassar (Studi Pemanfaatan *Closed Circuit Television* di Kota Makassar) dilihat dari (a) faktor manusianya yaitu dari kinerja pengelola *CCTV* yang dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan Dinas, namun jika kita melihat sumber daya manusia yang menjalankan atau mengoperasikan *CCTV* mereka sudah maksimal, serta masyarakatpun berpendapat jika dilihat dari faktor manusianya ini akan mengurangi tingkat kejahatan di kota Makassar yang dapat membahayakan masyarakat. (b) faktor teknologi, dengan adanya program pengadaan *CCTV* yang dimiliki oleh Dinas Tata Ruang dan Polrestabes kota Makassar dapat membantu para petugas dalam mengawasi kota Makassar dari kejadian yang tidak diinginkan serta membantu memantau masyarakat yang terkadang melakukan pelanggaran kejahatan tindak kriminal. (c) faktor kelemahan, diharapkan bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kota Makassar yang menjadi kelemahan program *Smart City* yaitu masih banyak tempat atau lokasi yang tidak terjangkau dalam pemasangan *CCTV* lebih terjamin keamanannya karena adanya pengawasan langsung dari pihak yang terkait.

Kata kunci: *Smart City*, Kota Cerdas, Pengawasan dan Kriminal.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Program *Smart City* Kota Makassar (Studi Pemanfaatan *Closed Circuit Television* di Kota Makassar)**". Serta tak lupa kita curahkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terkhusus pada dosen pembimbing Ibu Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Rudi Hardi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang dengan tulus membimbing penulis, meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, M.M, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Kedua orang tua tercinta yang telah mendidik, mengarahkan dan senantiasa mendoakan serta memberi dukungan yang tiada ternilai baik moral maupun materi serta nasehat dan pengorbanan yang tak terhingga.
6. Para sahabat yang selalu membantu, menyemangati dan memberikan nasehat selama ini dan menemani dari awal perkuliahan sampai sekarang demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis/skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 12 Juli 2018

Yuli Astuti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep <i>Smart City</i> dan Kebijakan Pemerintah	7
B. Kerangka Pikir	27
C. Fokus penelitian	29
D. Definisi Fokus Penelitian	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Informan Penelitian.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Pengesahan Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi atau Karakteristik Obyek Penelitian	37
B. Hasil Wawancara Faktor-Faktor penentu Program <i>Smart City</i> Kota Makassar (Studi Pemanfaatan <i>CCTV</i> di Kota Makassar).....	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Makassar merupakan ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai ibu Kota yang juga merupakan pintu gerbang dari Indonesia bagian timur yang merupakan jalur pandangan, ekonomi, sosial, politik dan segala kemajuan maka Kota Makassar mempunyai potensi untuk menjadi sebuah Kota dunia bahkan *Smart City* atau Kota pintar yang dapat menjadi Kota idaman bagi masyarakat baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Kesiapan Kota Makassar akan hal itu terbukti dari perkembangan infrastruktur di Kota Makassar yang berkembang pesat infrastruktur Kota yang lebih maju dan lengkap, menegaskan arah Makassar menuju Kota megapolitan semakin kentara.

Pemerintah daerah saat dituntut untuk melakukan pembaharuan diberbagai sektor sebagai suatu langkah untuk mengatasi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, adanya perkembangan teknologi yang semakin pintar membuat konsep *Smart* tak hanya diterapkan pada berbagai perangkat, tetapi pada berbagai sistem atau tatanan. Salah satunya yang mencuat akhir-akhir ini adalah konsep *Smart City*. Konsep yang disebut sebagai Kota pintar ini adalah konsep yang menengahkan sebuah tatanan Kota cerdas yang bisa berperan dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Selain itu, konsep Kota pintar ini memang dihadirkan sebagai jawaban untuk mengelola sumber daya secara efisien. Bisa dibilang, konsep Kota cerdas adalah integrasi informasi secara langsung dengan masyarakat perkotaan.

Walikota Makassar memperkenalkan langkah Pemerintah Kota untuk memudahkan pemantauan aktivitas warga yang semakin memadati Kota Makassar. Danny Pomanto memperkenalkan Makassar *Smart City* sebagai tujuan pembangunan perkotaan berkelanjutan dapat dicapai secara sistematis dan bertahap dengan perspektif jangka panjang.

Mendukung program ini pemerintah Kota Makassar mengatur penyediaan dan pemasangan *CCTV* dalam Perwali No 4 tahun 2017 dimaksudkan sebagai dasar hukum pemerintah daerah untuk mewajibkan dan/atau mendorong pemilik/pengelola Bangunan dan penyediaan pemasangan *CCTV* pada gedung-gedung dan pedoman bagi pemilik/pengelola Bangunan Gedung dalam penyediaan, pemasangan dan pengoperasian serta perawatan *CCTV*.

Visi pembangunan daerah berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2013-2018, arahan dari RPJPD Sulawesi Selatan, serta arahan dari visi RPJMN 2010-2014, visi pembangunan daerah Sulawesi Selatan 2013-2018 adalah: Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan. Untuk memberikan kejelasan tentang makna yang terkandung dalam visi tersebut, maka Pemerintah Provinsi melaksanakan Misi yang akan dijalankan pada 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama;
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan;

3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global;
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum;
6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan bangsa;
7. Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

Visi Kota Makassar dipertegas dalam perda Kota Makassar nomor 5 tahun 2014 tentang RPJMD Kota Makassar tahun 2014-2019 pasal 4 ayat 2 bahwa RPJMD disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, terutama untuk lebih menetapkan pencapaian visi pembangunan Kota Makassar.

Kepemimpinan Danny Pomanto dan Syamsul Rizal telah membuat program *Smart City* Kota Makassar khususnya pemanfaatan *CCTV* di Kota Makassar. Pada periode ini Pemerintah Kota mencoba membenah untuk menjadikan Makassar sebagai *Smart City*, salah satu adalah kemudahan mendapatkan informasi *Smart City* dengan mengintegrasikan *CCTV* seluruh satuan kerja perangkat daerah. Untuk mewujudkan *Smart City* khususnya keamanan kota dari maraknya kriminal jalanan yang merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Walikota Makassar dalam mewujudkan *Smart City* Kota Makassar yang berfokus pada pemanfaatan *CCTV* di Kota Makassar.

Smart City adalah salah satu program pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan “Makassar Kota Dunia Yang Nyaman Untuk Semua”. Program ini diharapkan agar masyarakat dapat mengedepankan aspek untuk keamanan kota Makassar dalam kehidupan sehari-hari karena tanpa dukungan masyarakat maka program *Smart City* tidak dapat berjalan dengan baik.

Setelah berjalannya program ini, tampaknya kondisi Kota Makassar masih belum banyak berubah dari segi keamanan kota. Masih banyak ditemui kriminal jalanan meskipun pengadaan *CCTV* di sejumlah ruang utama sudah terlaksana tetapi belum terealisasi dengan baik dan masih sering terjadi pencurian motor (Curanmor).

Dalam menjalankan program *Smart City* khususnya bidang keamanan kota telah membuat instruksi kepada SKPD dan kecamatan Se-Kota Makassar utamanya Dinas Informatika Kota Makassar agar melaksanakan program yang mendukung *Smart City*. Khususnya untuk lurah, mensosialisasikan *Smart City* kepada masyarakat. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum tahu yang dimaksud dengan *Smart City* dan bagaimana persiapannya sehingga belum berdampak terhadap perubahan pola pikir masyarakatnya.

Melihat kondisi di atas wajar jika sampai saat ini program *Smart City* untuk keamanan tidak terealisasi dengan baik. Kekuatan dalam menjalankan *Smart City* juga belum ada, baik Perda maupun Perwali yang membahas *Smart City* secara khusus di Kota Makassar.

Kota Makassar sebagai *Smart City* menjadi bagian dari program pemerintah Kota sebagai bagian dari masyarakat global. Program ini tidaklah

berjalan sendiri karena harus disandingkan dengan konsep kearifan lokal Makassar, yakni *Sombere* (keramahan). Dengan semangat *sombere*, maka interaksi antara pemerintah dan masyarakat semakin erat, terbangun kebersamaan, *responsibility*, tingkat improvisasi lebih tinggi, inisiatif dan keinginan menyelesaikan masalah sesegera mungkin, solutif, inovatif, semakin terbuka untuk melakukan perubahan, pelayanan yang mampu menggabungkan antara *gesture* (bahasa tubuh) dan lisan yang mencerminkan kecerdasan, keluhuran pekerti dan tata krama yang tinggi. Dengan demikian merekatkan antara *sombere* (*attitude*) dan pelayanan publik merupakan inovasi baru dan cara pandang baru dalam mewujudkan reformasi birokrasi, hal ini sebagai salah komponen penting penyusunan pola birokrasi yang diusung oleh Bapak walikota Makassar dan wakil walikota Makassar periode 2014-2019 dengan tagline “Dua Kali tambah lebih baik ($2x+\sqrt{\quad}$), *Smart City* dan kota yang berkelas dunia (*world class*) untuk semua”.

Banyaknya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *Smart City* di Kota Makassar salah satunya yaitu studi pemanfaatan *CCTV* dalam mewujudkan tantangan bagi perkembangan kota Makassar sebagai *Smart City*. Oleh karena itu penulis tertarik dengan program *Smart City* yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis mengambil judul penelitian “***Program Smart City Kota Makassar (Studi Pemanfaatan CCTV di Kota Makassar)***”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana program *Smart City* Kota Makassar (Studi Pemanfaatan *CCTV* di Kota Makassar)?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui program *Smart City* Kota Makassar (Studi Pemanfaatan *CCTV* di Kota Makassar)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam kasus pengadaan kebijakan *CCTV* dan sebagai salah satu bahan masukan yang berharga bagi penelitian berikutnya dalam mewujudkan program *Smart City* di Kota Makassar.

2. Manfaat praktis

Bermaanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan mengenai program *Smart City* Kota Makassar dalam studi kasus pemanfaatan *CCTV* di Kota Makassar dalam sebuah bentuk karya tulis ilmiah serta dapat berguna bagi masyarakat dengan adanya pengadaan *CCTV* di sejumlah ruang Kota Makassar untuk mendapatkan informasi keamanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep *Smart City* Dan Kebijakan Pemerintah

1. Pengertian *Smart City*

Konsep Kota cerdas atau yang lebih dikenal dengan nama *Smart City* sangat populer dikembangkan sebagai salah satu konsep penataan Kota-Kota di dunia beberapa tahun belakangan ini seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Konsep ini awalnya tumbuh semenjak tahun 1990an di mana koneksi internet mulai mendunia sejak diperkenalkan pada tahun 1960an. Menurut Allwinkle & Cruickshank (2007), perkembangan internet pada periode tersebutlah yang membuat pelayanan menjadi semakin mudah dengan adanya informasi yang dapat diakses melalui situs yang disediakan pemerintah Kota. Meski masih terbatas berupa layanan satu arah dengan hanya informasi yang bersifat statis dan terbatas tentang kebijakan perkotaan, guna lahan, dan perencanaan, namun tidak dipungkiri lagi bahwa ini adalah awal munculnya konsep *Smart City*. Penggunaan fasilitas internet yang multifungsi mengubah perilaku atau budaya sebagian besar warga Kota dari pola-pola layanan konvensional menjadi layanan yang serba digital dan instant. Peningkatan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi tersebut memicu terbentuknya suatu konsep *Smart City* pada negara-negara maju. *Smart City* sudah banyak diterapkan dibanyak negara di dunia, baik di kawasan Eropa, Amerika, Australia, dan Asia (Pratama, 2014).

Smart City atau secara harfiah berarti Kota pintar, merupakan suatu pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan untuk

suatu wilayah (khususnya perkotaan) sebagai sebuah interaksi yang kompleks diantara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Di sini digunakan kata *City* (Kota) untuk merujuk pada Kota sebagai pusat dari sebuah negara atau wilayah, di mana setiap pusat kehidupan berada (pemerintahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain). Demikian pula dengan pusat pemukiman penduduk di mana jumlah penduduk di Kota relatif jauh lebih banyak dibanding wilayah lainnya (misal desa/sub Kota). Kota menjadi daya tarik orang untuk menetap. Di Indonesia sendiri urbanisasi mengacu pada proses perpindahan masyarakat dari desa ke Kota untuk memperoleh penghidupan (kerja) maupun pendidikan.

Perkembangan teknologi yang semakin pintar salah satunya yang mencuat akhir-akhir ini adalah *Smart City* sebagai Kota pintar dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Apalagi ditopang banyaknya sarana penunjang dan tercapainya sebuah Kota untuk menuju *Smart City* dalam arti sesungguhnya, bukan hanya pintar dalam pecanggihan teknologi, namun bagaimana mengedepankan sosio-budaya akan beriringan dengan kemajuan Kota itu sendiri. *Smart City* adalah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Beberapa para ahli menganggap konsep Kota dengan *Smart City* dapat memenuhi kebutuhan akan kemudahan hidup dan kesehatan, walaupun pada kenyataannya konsep *Smart City* masih dalam perdebatan oleh para ahli dan belum ada defenisi

dan konsep umum yang bisa diterapkan disemua kota di dunia. Konsep *Smart City* masih bergantung pada Kota dan pengembang masing-masing.

Banyak faktor yang membuat *Smart City* ini menjadi sukses di beberapa Negara berkembang, selain inisiatif yang membuat *Smart City* ini berhasil, adapun faktor-faktor lain yaitu :

1. Manajemen dan organisasi

Suatu organisasi harus memiliki manajemen yang terstruktur agar organisasi tersebut berjalan baik, seimbang dan lancar. Dalam hal ini faktor organisasi dan manajemen merupakan faktor yang menentukan kemajuan terciptanya *Smart City*, karena manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan.

2. Teknologi

Teknologi informasi merupakan sebuah pendorong utama bagi inisiatif *Smart City*. Proyek pembangunan *Smart City* dengan mengacu pada teknologi informasi dapat mengubah sejumlah peluang yang potensial, mereka dapat meningkatkan manajemen dan fungsi Kota. Namun, meskipun banyak manfaat dari teknologi tersebut dampaknya masih belum terlihat jelas, karena terdapat kesenjangan sosial bagi penduduk yang tinggal di pedesaan yang belum mendapatkan fasilitas tersebut. Maka dari itu pemerintah Kota harus banyak mempertimbangkan faktor-faktor tertentu ketika mengimplementasikan teknologi informasi yang berkaitan dengan sumber daya, kapasitas, dan hal-hal yang berkaitan dengan kesenjangan sosial nantinya.

3. Pemerintahan

Beberapa Kota di Negara berkembang sudah memulai proyek pembangunan *Smart City* yang inisiatif. Proyek ini disebut inisiatif *Smart City* untuk melayani warga dan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, beberapa Kota telah merasakan peningkatan kebutuhan pemerintahan untuk mengelola proyek. Dukungan dari pemerintah juga merupakan salah satu faktor yang penting untuk kemajuan *Smart City*. Karena tanpa dukungan pemerintah impian untuk mewujudkan *Smart City* akan sulit untuk diwujudkan.

4. Kebijakan

Perpindahan dari sebuah Kota biasa menjadi *Smart City* memerlukan interaksi komponen teknologi dengan politik dan kelembagaan. Komponen politik mewakili berbagai elemen dan tekanan eksternal, seperti kebijakan politik yang mungkin mempengaruhi ide dari pembuatan *Smart City*. Konteks kebijakan sangat penting bagi pemahaman dari penggunaan sistem informasi. Pemerintah yang inovatif yang ikut serta dalam membangun *Smart City* menekankan perubahan dalam suatu kebijakan.

5. Masyarakat

Masyarakat merupakan bagian penting dari terciptanya *Smart City*, karena dengan demikian kebiasaan-kebiasaan yang dulu mulai ditinggalkan. Proyek *Smart City* berdampak pada kualitas hidup warga dengan tujuan menjadikan sebuah Kota menjadi lebih efisien. Masyarakat juga dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Kota, serta menjadi pengguna Kota yang aktif. Masyarakat juga adalah faktor yang paling menentukan keberhasilan atau kegagalan terciptanya *Smart City*.

6. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan pendorong utama *Smart City*. Sebuah Kota dengan daya saing ekonomi yang tinggi dianggap memiliki salah satu sifat *Smart City*. Faktor ekonomi termasuk salah satu daya saing inovasi, kewirausahaan, dan produktivitas dari Kota tersebut.

7. Infrastruktur

Infrastruktur memegang peranan penting dalam membuat *Smart City*. Karena *Smart City* dibangun berdasarkan infrastruktur *ICT* seperti wi-fi dan hotspot. Pembangunan infrastruktur *ICT* merupakan hal yang mendasar dalam melakukan pembangunan *Smart City*. Pembangunan infrastruktur tergantung pada beberapa faktor yang terkait untuk kinerja dan ketersediaannya.

8. Lingkungan

Faktor lingkungan dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi kemajuan *Smart City* karena nantinya lingkungan sebuah Kota menggunakan teknologi dalam menjalani kelangsungan hidup masyarakatnya.

Tujuan dari konsep *Smart City* ini adalah untuk mengatasi berbagai karakteristik inovasi ekosistem oleh semua gagasan *Smart City* diantaranya menjadi kota hijau, saling berhubungan, terpadu untuk semua lapisan dan bentuk kota. Perencanaan *Smart City* menggunakan model referensi untuk menentukan konsep tata letak Kota yang cerdas dan berkarakter. *Smart City* ini pada intinya memiliki 6 dimensi yaitu ekonomi yang cerdas, mobilitas cerdas, lingkungan pintar, orangnya cerdas, cerdas dalam hidup dan akhirnya pemerintahan yang cerdas pula.

Smart City atau Kota cerdas, pada umumnya didasarkan pada 3 hal, pertama faktor manusia, Kota dengan manusia-manusia yang kreatif dalam pekerjaan, jejaring pengetahuan, lingkungan yang bebas dari kriminal. Kedua faktor teknologi, Kota yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Terakhir faktor kelemahan, masyarakat Kota (pemerintah, kalangan bisnis dan penduduk yang memahami teknologi informasi dan membuat keputusan berdasarkan pada teknologi informasi (Ahmad Nurmandi, 2014 : 400)

Beberapa para ahli mencoba mendefinisikan *Smart City* dengan defenisi masing-masing berdasarkan bidang keilmuan masing-masing, antara lain menurut Caragliu, A., dkk (dalam schaffers, 2010 : 3) *Smart City* didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat sedangkan menurut Jung Hoon (dalam Hendro, 2015 : 3) *Smart City* merupakan Kota dengan investasi modal manusia dan sosial, dengan manajemen SDA yang bijaksana melalui tata pemerintahan yang partisipatif.

Konsep *Smart City* multi tafsir yang menjadikan multi tafsir pada hakekatnya ialah istilah atau konsep "*Smart*". Yahya (2013) mengartikan *Smart* sebagai bersikap, berpikir dan bertindak secara cerdas dalam pekerjaan yang dilakukan. Lebih jauh ia mengatakan *Smart* terwujud oleh rasa melalui intuisi yang tajam, olah rasio melalui kreativitas dan inovasi yang menghasilkan terobosan (*breakthrough*), dan olahraga melalui aksi-aksi yang impresif. Korea

selatan, menerjemahkan *Smart City* sebagai Kota “pengetahuan”, Kota “digital”, Kota “*cyber*” atau Kota “*eco*” sekaligus. Mencermati hal tersebut, konsep *Smart City* menggambarkan konsep yang terbuka atas tafsir-tafsir yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan (misalnya Pemerintahan Kota), tergantung kepada para perencana Kota mendisain tujuan Kota kearah mana. Akan tetapi, apapun tafsir yang diberikan untuk konsep *Smart City*, esensi yang tidak boleh hilang ialah pembenahan atau pembangunan Kota yang dilakukan secara berkelanjutan, tetap memperhitungkan aspek fungsional, struktural, dan estetika, melalui penggunaan teknologi komunikasi dan informasi sebagai basis infrastrukturnya.

Smart City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif Kota. Kemunculan *Smart City* merupakan hasil dari gabungan modal sumber daya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik), modal infrastruktur (contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi), modal sosial (contohnya jaringan komunitas yang terbuka) dan modal entrepreneurial (contohnya aktifitas bisnis kreatif). Pemerintahan yang kuat dan dapat dipercaya disertai dengan orang-orang yang kreatif dan berpikiran terbuka akan meningkatkan produktifitas lokal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu Kota (Kourtit & Nijkamp, 2012).

Asumsi dasar yang digunakan sehingga pemikiran mengenai *Smart City* layak untuk dikedepankan menyangkut hal-hal berikut:

- a. Kota-Kota Indonesia perlu secara cermat mengatasi persoalan ledakan penduduk perkotaan akibat urbanisasi yang brutal, tidak tertahankan, apabila

kita berharap Kota-Kota tersebut dapat menjadi layak huni dimasa mendatang. Salah satunya adalah dengan pengendalian jumlah penduduk dan retribusinya, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

- b. Krisis perkotaan dapat kita hindari, sebagaimana yang terjadi di Kota-Kota besar dan metropolitan yang telah mengalami obesitasi perkotaan, apabila kita mampu menangani perkembangan kota-kota kecil dan menengah secara baik, antara lain dengan penyediaan ruang terbuka hijau, pengembangan jalur sepeda dan pelestarian, pengembangan Kota kompak, dan pengendalian penjalaran kawasan pinggiran.

Smart City adalah sebuah impian dari hampir semua Negara di Dunia. Dengan *Smart City*, berbagai macam data dan informasi yang berada disetiap sudut Kota dapat dikumpulkan melalui sensor yang terpasang disetiap sudut Kota, dianalisa dengan aplikasi cerdas, selanjutnya disajikan sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui aplikasi yang dapat diakses oleh berbagai jenis gadget. Melalui gadgetnya, secara interaktif pengguna juga dapat menjadi sumber data, mereka mengirim informasi ke pusat data untuk dikonsumsi oleh pengguna yang lain. Konsep *Smart City* sebagai berikut:

- a. Sebuah Kota berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, lingkungan hidup.
- b. Sebuah Kota yang mengontrol dan mengintegrasikan semua infrastruktur termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel, kereta bawah tanah, bandara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik, dan pengelolaan gedung. Dengan begitu dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya serta merencanakan

pencegahannya. Kegiatan pemeliharaan dan keamanan dipercayakan kepada penduduknya.

- c. *Smart City* dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial, dan bisnis infrastruktur untuk meningkatkan kecerdasan Kota.
- d. *Smart City* membuat Kota lebih efisien dan layak huni.
- e. Penggunaan *Smart Computing* untuk membuat *Smart City* dan fasilitasnya meliputi pendidikan, kesehatan, keselamatan umum, transportasi yang lebih cerdas, saling berhubungan dan efisien.

2. Pengertian Keamanan

Keamanan adalah keadaan aman dan tentram (Tarwoto dan Wartonah, 2010). Keamanan tidak hanya mencegah rasa sakit atau cedera tapi keamanan juga dapat membuat individu aman dalam aktifitasnya, mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan umum. Keamanan fisik (*biologic safety*) merupakan keadaan fisik yang aman terbebas dari ancaman kecelakaan dan cedera (*injury*) baik secara mekanis, thermis, listrik maupun bakteriologis. Kebutuhan keamanan fisik merupakan kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya yang mengancam kesehatan fisik, yang pada pembahasan ini akan difokuskan pada *providing for safety* atau memberikan lingkungan yang aman (Fatmawati, 2009)

Kebutuhan akan keamanan adalah kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya fisik. Ancaman terhadap keselamatan seseorang dapat dikategorikan sebagai ancaman mekanis, kimiawi, termal dan bakteriologis. Kebutuhan akan keamanan terkait dengan konteks fisiologis dan hubungan interpersonal.

Keamanan fisiologis berkaitan dengan sesuatu yang mengancam tubuh dan kehidupan seseorang. Dalam konteks hubungan interpersonal bergantung pada banyak faktor, seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengontrol masalah, kemampuan memahami, tingkah laku yang konsisten dengan orang lain, serta kemampuan memahami orang-orang disekitarnya dan lingkungannya (Asmadi, 2005)

Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan segala bentuk kecelakaan dan lain-lain. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamanan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap *hacker* atau *cracker*, keamanan rumah terhadap maling dan penyusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi berhubungan lainnya. Ada banyak literatur dalam analisis dan pengkategorian keamanan. Bagian penting dari keamanan adalah "titik terlemah dalam rantai". Situasinya juga berbeda karena pelindung harus mencakup semua titik serangan sedangkan penyerang hanya harus mengidentifikasi satu titik lemah dan berkonsentrasi disitu.

Konsep dasar keamanan terkait dengan kemampuan seseorang dalam menghindari bahaya, yang ditentukan oleh pengetahuan dan kesadaran serta motivasi orang tersebut untuk melakukan tindakan pencegahan. Ada tiga faktor penting yang terkait dengan keamanan yaitu: tingkat pengetahuan dan kesadaran individu, kemampuan fisik dan mental untuk melakukan upaya pencegahan, serta lingkungan fisik yang membahayakan atau berpotensi menimbulkan bahaya (Roper, 2002).

Menurut Widanti (2008:6) keamanan adalah proteksi perlindungan atas sumber-sumber fisik dan konseptual dari bahaya alam dan manusia, Keamanan terhadap sumber konseptual meliputi data dan informasi.

3. Pengertian CCTV

CCTV (Closed Circuit television) merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor disuatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu. Pada umumnya *CCTV* seringkali digunakan untuk mengawasi area *public*. Awalnya gambar dari kamera *CCTV* hanya dikirim melalui kabel ke sebuah ruang monitor tertentu dan dibutuhkan pengawasan secara langsung oleh operator/petugas keamanan dengan resolusi gambar yang masih rendah.

Menurut Evarida (2009: 5) *CCTV* adalah *Surveillance camera* atau kamera pengawas yang terdiri dari kamera dan sistem DVR (*Digital Video Recording*) yang digunakan untuk mengawasi dan merekam segala bentuk aktifitas dalam suatu area / lokasi.

Menurut Suprijono (2009), *CCTV* adalah komunikasi dan interaksi baik secara audio, visual (*face to face*) dan juga data antara satu bagian atau lebih dalam satu waktu yang dipisahkan oleh ruang (*space*) dengan memakai media elektronik dan penggunaan kamera video untuk mengirimkan sinyal kesuatu tempat tertentu, melalui perangkat monitor. Alat ini berbeda dengan televisi *broadcast*, karena sinyalnya tidak terbuka untuk umum, walaupun mungkin sama-sama tidak menggunakan kabel.

Pada pemanfaatan teknologi *Closed Circuit Television* atau yang biasa disingkat *CCTV*. *CCTV* telah menjadi sebuah teknologi yang populer dan telah memasuki hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Teknologi *CCTV* dimanfaatkan oleh berbagai tempat publik seperti sekolah, rumah sakit, hotel, kantor, gudang, jalan raya, taman, dan banyak tempat lainnya untuk meningkatkan standar keamanannya. Namun di balik keuntungannya tersebut, *CCTV* sangat rentan terhadap isu privasi dan rawan disalahgunakan untuk tindakan kejahatan berbasis teknologi (Hasan, 2016).

Ruang publik di Kota-Kota besar sangat rawan terhadap tindakan kriminalitas karena selalu menjadi tempat berkumpulnya penduduk kota dari segala macam latar belakang. Pengawasan menggunakan *CCTV* dinilai sebagai salah satu cara untuk menciptakan keamanan yang maksimal, meskipun sebenarnya *CCTV* sangat efektif untuk menanggulangi tindak kejahatan namun kurang begitu efektif dalam usaha pencegahan (Hasan, 2016).

Tujuan *CCTV (Closed Circuit Television)* sangat penting untuk keamanan disegala situasi, baik di Sekolah maupun tempat yang perlu pengawasan yang dianggap penting dan memantau kejadian-kejadian yang dianggap melanggar. Tujuan dari *CCTV* adalah sebagai berikut:

- a. *Deterance/* Faktor pencegah : pelaku kriminal seringkali menggunakan niat/takut setelah melihat adanya kamera *CCTV* yang sudah terpasang di tempat sasaran apabila sasaran memiliki kamera *CCTV*.
- b. *Monitoring/* Pemantauan sistem *CCTV* berguna untuk memonitoring/ mengawasi keadaan dan kegiatan di lokasi yang terpasang kamera *CCTV*.

- c. *Intensify*/ Peningkatan kinerja: dengan adanya sistem *CCTV* terbukti meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan.
- d. *Investigation*/ Penyelidikan: sistem *CCTV* berguna untuk menunjang penyelidikan tindak kejahatan yang telah terjadi.
- e. *Evidence*/ Bukti: Hasil rekaman video *CCTV* dapat dijadikan bukti tindak kejahatan/kriminal.

Closed Circuit Television (CCTV) adalah alat perekam yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video ataupun audio. Cara kerja kamera *CCTV* yaitu mengirimkan sinyal secara tertutup lewat melalui wireless ataupun kabel. Di dalam, terhadap *motion detector*, yang merupakan fitur untuk mengurangi beban penyimpanan data. Cara kerja *motion detector* adalah mendeteksi adanya perubahan pixel. Jika terjadi sebuah gerakan, maka kamera *CCTV* menganggap nilai pixelnya berubah dan akhirnya merekam perubahan tersebut (Anonymous. 2012)

Pawson dan Tilley (dalam Philips, 2001) merumuskan sembilan mekanisme potensial yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas kontribusi *CCTV* bagi *retail store*, antara lain:

1. Tertangkap saat beraksi

Keberadaan *CCTV* akan menekan pencurian, karena dengan *CCTV*, maka pencuri yang sedang beraksi akan terdeteksi dari monitor, dan segera dapat diamankan dan dihukum.

2. Perasaan diawasi

Keberadaan *CCTV* mencegah pencuri potensial yang tidak ingin perbuatannya terekam oleh kamera.

3. Mengundang keramaian

Keberadaan *CCTV* akan membuat orang merasa aman dan leluasa berjalan di lokasi tersebut, sehingga secara tidak langsung mengundang keramaian. Hal ini akan mencegah pelaku kejahatan untuk beraksi.

4. Penangkapan yang efektif

CCTV membantu memfasilitasi petugas keamanan untuk mengetahui dengan tepat posisi pencuri, sehingga dapat langsung melakukan tindakan penangkapan atau menggagalkan aksi pencurian dengan tepat sasaran.

5. Publikasi

Pencuri potensial akan menganggap tempat yang dilengkapi dengan *CCTV* sebagai tempat yang terpublikasi atau dalam pengawasan. Hal ini akan mencegah pencuri potensial untuk menjalankan aksinya.

6. Waktu untuk beraksi

Adakalanya pencuri menghitung waktu untuk beraksi, yaitu seberapa cepat mereka dapat menjalankan aksi dan kabur sebelum petugas keamanan datang. Namun dengan adanya *CCTV*, maka akan membantu petugas mengetahui lokasi pencuri dengan tepat dan bertindak lebih cepat.

7. Rekaman Aksi

Seandainya pencuri dapat kabur, maka setidaknya profil pencuri sempat terekam kamera, sehingga petugas keamanan lebih mudah dalam melakukan pengejaran dan penangkapan.

8. Lebih Berhati-Hati

Pada tempat yang dilengkapi dengan *CCTV* akan membuat pencuri potensial bersikap jauh lebih berhati-hati, bahkan lebih dari orang pada umumnya.

4. Pengertian Kebijakan Pemerintah

Pengertian kebijakan Pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dengan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Sesuai dengan sistem administrasi negara Republik Indonesia, kebijakan dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Kebijakan internal (*manajerial*), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat apatur dalam organisasi pemerintah sendiri.
2. Kebijakan eksternal (publik) yaitu suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum, sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus tertulis.

Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan berbagai bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh pemerintah pusat berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (KepMen) dan lain-lain. Sedangkan jika kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh pemerintah daerah akan melahirkan surat keputusan (SK), peraturan daerah (PerDa) dan lain-lain.

Dalam penyusunan kebijaksanaan/kebijakan mengacu pada hal-hal berikut:

1. Berpedoman pada kebijaksanaan yang lebih tinggi.
2. Konsisten dengan kebijaksanaan yang lain yang berlaku.
3. Berorientasi ke masa depan.
4. Berpedoman pada kepentingan umum.
5. Jelas dan tepat serta transparan.
6. Dirumuskan secara tertulis.

Pasca reformasi, Negara Indonesia menganggap dirinya sebagai negara demokrasi. Setelah terlepas dari kekuatan dan kekuasaan rezim Soeharto “orde lama” maka sekarang ini rakyat dituntut untuk mampu menentukan dan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam kekuasaan negara.

Aksi demo dari berbagai kalangan selalu dilakukan demi tercapainya kebijakan pemerintahan yang harus sesuai dengan kehendak rakyat, namun apakah itu benar? Dan yang harus dipertanyakan kembali adalah apakah rakyat mengerti tentang kebijakan serta sistem yang mengikuti adanya kebijakan tersebut? Rasanya tak pantas bila kita hanya menyalahkan sesuatu namun kita tidak mengetahui sesuatu yang kita salahkan itu.

Ada beberapa teori tentang kebijakan diantaranya yaitu; menurut Ealau dan Penwitt (1973) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan Menurut Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu dan Menurut Edi Suharto (2008:7) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang membuat prinsip-prinsip untuk

mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan (tantangan) terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Selain 3 teori di atas kebijakanpun dapat didefinisikan sesuai dengan yang mengikutinya, antara lain yaitu:

1. Teori kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktifitas kelembagaan di mana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik.
2. Teori kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai sekelompok yang memerintah.
3. Teori Elit memandang kebijakan pemerintah sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah.

4. Teori Rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap.
5. Teori Inkremental kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu disertai modifikasi secara bertahap.
6. Teori Permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing.
7. Teori kebijakan yang lain adalah teori campuran yang merupakan gabungan model rasional komprehensif dan inkremental.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian

dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan yang diambil masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut testisasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu

kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan ini demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Perlu kita ketahui mengapa kita harus mengetahui serta memahami setiap kebijakan yang ada, karena kebijakan tidak bisa dipahami secara tekstual, namun menetapkan kebijakan. Disinilah peran media sebagai fasilitator untuk transformasi informasi kepada rakyat. Maka haruslah setiap media yang ada bersifat independen atau tidak terpengaruhi oleh kekuasaan politik tertentu. Selain media sebagai alat, masyarakat berperan untuk dapat menganalisis setiap kebijakan dan mampu membantu menyusun kebijakan yang ada. Inilah 2 tujuan mempelajari kebijakan pemerintah.

Ada 2 akibat yang timbul dari penetapan kebijakan, yaitu: kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik dalam arti sesuai dengan makna demokrasi dan kebijakan yang meracuni *public*/kebijakan yang ditetapkan hanya untuk kepentingan beberapa kalangan saja dan hal dampak kedua ini sangatlah kontra produktif terhadap nilai-nilai demokrasi.

Seperti yang telah kita ketahui, salah satu fungsi politik adalah untuk membuat kebijakan dan kebijakan ada karena 2 faktor; adanya masalah sosial dan adanya pergantian kekuasaan yang mengakibatkan kebijakanpun berubah-ubah.

Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara; pembuatan peraturan UU, perencanaan kegiatan, aneka intervensi terhadap ekonomi/ social masyarakat.

Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah maka kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah serta sesuai hukum dan wewenang pemerintah.

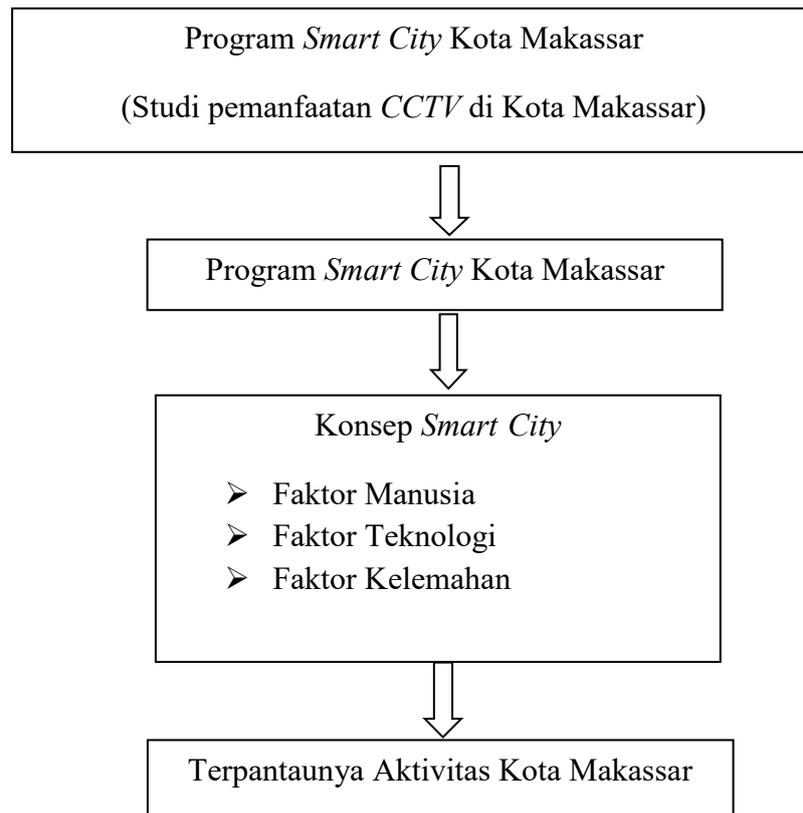
B. Kerangka Pikir

Menurut Thomas Dye kebijakan sebagai pilihan pemerintahan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sementara Lasswel dan kaplan melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program-program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo kebijaksanaan pemerintah dapat diartikan setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah atau Negara atas nama instansi yang dipimpinnya (Presiden, Menteri, Gubernur, Sekjen dan seterusnya) dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan, guna mengatasi pembangunan tertentu atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk keputusan normal.

Dalam hal ini, pemerintah Kota Makassar mengadakan pemanfaatan *CCTV* dalam program *Smart City* di Kota Makassar. Sesuai konsep *Smart City* yang dikemukakan oleh Ahmad Nurmandi, 2014 : 400 pada umumnya didasarkan pada 3 hal, pertama faktor manusia, Kota dengan manusia-manusia yang kreatif dalam pekerjaan, jejaring pengetahuan, lingkungan yang bebas dari kriminal. Kedua faktor teknologi, Kota yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi.

Terakhir faktor kelemahan, masyarakat Kota (pemerintah, kalangan bisnis dan penduduk).

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir



C. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, maka yang menjadi fokus Penelitian ini adalah “Program *Smart City* Kota Makassar (Studi pemanfaatan *CCTV* di Kota Makassar)”

D. Definisi Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, maka yang menjadi deskripsi fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Program *Smart City* Kota Makassar adalah salah satu program untuk pengadaan *CCTV* dalam rangka mewujudkan terciptanya keamanan dan

ketertiban di Sekolah, Kantor maupun tempat yang memerlukan pengawasan *CCTV*.

2. Faktor Manusia yang dimiliki dari segi kinerja yang diharapkan maksimal diperlihatkan oleh pengelola *CCTV*.
3. Faktor Teknologi adalah fasilitas yang sangat membantu para petugas dalam mengawasi Kota Makassar dari kejadian yang tidak diinginkan atau pelanggaran kejahatan yang bisa terekam *CCTV*.
4. Faktor Kelemahan banyaknya tempat atau lokasi yang tidak terjangkau dan belum terpasang *CCTV* serta adanya perusakan *CCTV* oleh masyarakat sekitar.
5. Terpantaunya Aktifitas Kota Makassar bisa melalui kamera *CCTV* yang terpasang di Sekolah, Kantor maupun tempat yang memerlukan pengawasan yang dianggap penting dan memantau kejadian-kejadian yang dianggap melanggar ketertiban umum.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi penelitian

Penelitian ini, dilakukan pada bulan Desember 2017, lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Tata Ruang dan Polrestabes Makassar. Bertujuan untuk memfasilitasi keamanan kota Makassar dengan adanya kebijakan pengadaan *CCTV* ini akan sangat membantu Kepolisian dan Dinas Tata Ruang dalam memantau potensi kejahatan lalu lintas dan tindak pidana kriminal lainnya. Maka dari itu alasan saya mengambil judul ini agar masyarakat kota Makassar dapat terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Penelitian kualitatif bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpensikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut perspektif partisipan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan Tipe deskriptif kualitatif atas dasar bahwa informasi yang akan diteliti adalah berkaitan dengan penghayatan, pemahaman dan pemberian arti dari informan tentang Program *Smart City* Kota Makassar (Studi Pemanfaatan *CCTV* di Kota Makassar). Sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran (deskriptif) mengenai situasi-situasi atau kejadian. Kekuatan penelitian kualitatif terletak pada kemampuan peneliti dalam membangun pandangan mereka tentang apa yang diteliti secara rinci yang dinarasikan dengan kata-kata maupun gambaran secara holistik.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi tentang Program *Smart City* Kota Makassar (Studi pemanfaatan *CCTV* di Kota Makassar)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari kantor Dinas Tata Ruang dan Polrestabes, data tersebut berupa catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini digunakan metode dengan cara pemilihan secara purposif, informan dipilih berdasarkan pada tujuan

penelitian. Adapun yang akan dijadikan informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengambilan informan penelitian ini dengan cara pemilihan secara purposive, informan sebagai berikut, Dani Hamdani sebagai kepala bagian Umum di Kantor Dinas Tata Ruang Kota Makassar, Bripda Abd Azis dan Bripka Nasrullah Muntu sebagai salah satu bagian pemantauan kamera *CCTV* di Polrestabes Makassar, Zainuddin sebagai Masyarakat pengguna *CCTV*, Rahmatia Bobby sebagai Masyarakat pengguna *CCTV* dan Dewi Kurniawati sebagai masyarakat pengguna *CCTV*. Pemilihan informan tersebut karena merekalah yang dianggap paling mengetahui tentang persoalan pemanfaatan *CCTV* di Kota Makassar.

Tabel I Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Inisial	Jabatan	Ket
1	Dani Hamdani, S.Sos	45	DH	Kepala Bagian Umum di Kantor Dinas Tata Ruang kota Makassar	1 Orang
2	Bripda Abd Asiz	38	AA	Bagian pemantauan Kamera <i>CCTV</i> di Polres Makassar	1 Orang
3	Bripka Nasrullah Muntu	40	NM	Bagian pemantauan Kamera <i>CCTV</i> di Polres Makassar	1 Orang

4	Zainuddin	47	ZN	Pengguna <i>CCTV</i> (Masyarakat)	1 Orang
5	Rahmatia Bobby	50	RB	Pengguna <i>CCTV</i> (Masyarakat)	1 Orang
6	Dewi Kurniawati	23	DK	Pengguna <i>CCTV</i> (Masyarakat)	1 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, penelitian dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian di Dinas Tata Ruang Kota Makassar dan Polrestabes Makassar untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi dan kembali kepada observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dengan wawancara lebih banyak

dilakukan pada penelitian kualitatif dari pada penelitian kuantitatif. Kelebihan metode wawancara adalah peneliti bisa menggali informasi tentang topik penelitian secara mendalam, bahkan bisa mengungkapkan hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh peneliti itu sendiri. Akan tetapi, metode wawancara memerlukan kecakapan peneliti yang lebih dari pada pengumpulan data dengan metode yang lain mengenai program *Smart City* Kota Makassar dalam studi pemanfaatan *CCTV* di Kota Makassar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik untuk mengumpulkan data yang diambil dari beberapa buku bacaan maupun dokumen dan foto-foto yang berhubungan dengan objek penelitian di lokasi penelitian untuk melengkapi data tentang program *Smart City* Kota Makassar dalam studi pemanfaatan *CCTV* di Kota Makassar.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian, analisis data harus dilakukan untuk lebih obyektif dalam memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan diolah dengan dukungan logika berfikir serta keabsahan dokumen sehingga akan diuraikan secara sistematis yang mampu menjelaskan hubungan-hubungan berbagai jenis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dengan logika deduktif. Menurut Miles dan Huberman (2007) analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga

alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu reduksi data penyajian dan data penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Proses reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemutusan pemilihan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi kasar yang manual dari catatan-catatan di lapangan. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan yang harus dilakukan. Menarik kesimpulan adalah memulai mencari data dengan mencari arti benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi yang mungkin alur sebab dan proposisi. (Miles dan Huberman, 2007 teknik analisa data kualitatif).

G. Pengabsahan Data

Validasi data sangat mendukung hasil akhir penelitian. Oleh karena itu, diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang, yakni mengadakan pengecekan data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi.

1. Triangulasi teknik, berarti penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

Penelitian menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

2. Triangulasi waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.
3. Triangulasi sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Obyek Penelitian

1. Profil Umum kota Makassar

a. Kondisi fisik dan wilayah

Kota Makassar yang dahulu disebut Ujung Pandang adalah ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, juga merupakan pusat pertumbuhan wilayah dan pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia. Karena pertumbuhan ekonomi dan letak geografisnya (Selat Makassar), sehingga Kota Makassar memegang peranan penting sebagai pusat pelayanan, distribusi dan akumulasi barang/jasa dan penumpang, yang ditunjang dengan sumber daya manusia, serta fasilitas pelayanan penunjang lainnya. Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah

perairan kurang lebih 100 Km². Wilayah Kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan yang meliputi 143 kelurahan.

b. Profil penggunaan CCTV

Kota Makassar dengan jumlah penduduk telah mencapai 1,7 jiwa lebih, denyut jantung Kota yang terus menggeliat, aktivitas ekonomi dan sosial seperti tidak tidur, diminta atau pun tidak, pelayanan Publik (tertentu) harus lebih responsif (tangkas) dan selalau standby (online) 24 Jam. Dengan Luas Kota Makassar 175,77 km persegi, CCTV telah menjadi alat penting untuk meningkatkan pemantauan dalam rangka meningkatkan responsibilitas dan efektifitas pelayanan publik. Kebutuhan CCTV Kota Makassar berdasarkan panjang jalan 1.593,46 km (Makassar dalam Angka, 2017), jika jarak penempatan CCTV minimal 500 meter per titik maka idealnya jumlah CCTV Kota Makassar sekitar 3000 titik. CCTV yang sudah terbangun baru mencapai sekitar 300 titik dari tahun 2017 sampai 2018. Dari APBD Kota Makassar dan beberapa titik CCTV dari CSR provider telekomunikasi.

Pada pemanfaatan teknologi *Closed Circuit Television* atau yang biasa disingkat CCTV. CCTV telah menjadi sebuah teknologi yang populer dan telah memasuki hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Teknologi CCTV dimanfaatkan oleh berbagai tempat publik seperti sekolah, rumah sakit, hotel, kantor, gudang, jalan raya, taman, dan banyak tempat lainnya untuk meningkatkan standar keamanannya. Namun dibalik keuntungannya tersebut, CCTV sangat rentan terhadap isu privasi dan rawan disalahgunakan untuk tindakan kejahatan berbasis teknologi. Ruang publik di Kota-Kota besar sangat rawan terhadap

tindakan kriminalitas karena selalu menjadi tempat berkumpulnya penduduk Kota dari segala macam latar belakang. Pengawasan menggunakan *CCTV* dinilai sebagai salah satu cara untuk menciptakan keamanan yang maksimal, meskipun sebenarnya *CCTV* sangat efektif untuk menanggulangi tindak kejahatan namun kurang begitu efektif dalam usaha pencegahan.

Dibalik keuntungannya dari sisi keamanan, *CCTV* juga menimbulkan kontroversi tersendiri terkait dengan hak pribadi/privasi. Bagi sebagian orang, mungkin akan merasa risih ataupun terganggu ketika setiap aktivitas dan gerak-geriknya terekam pada *CCTV*. Selain itu, *CCTV* juga sangat rentan disalahgunakan untuk melakukan sebuah tindakan kriminal, misalnya seperti penyadapan. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya mengatur pemanfaatan *CCTV* dengan menjamin hak pribadi/privasi setiap orang. Aturan tersebut tertuang pada Pasal 26 UU ITE yang mengatur tentang hak setiap orang untuk mengajukan gugatan perdata apabila merasa hak pribadinya telah dirugikan.

Pemanfaatan *CCTV* perlu memperhatikan faktor etika dan hukum yang berlaku agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Pemanfaatan *CCTV* tidak melanggar etika dan hukum yang ada, selama objek/orang yang bersangkutan mengetahui secara sadar atau menyetujui bahwa segala tindakan yang dilakukan pada suatu tempat tertentu direkam dan tidak menimbulkan kerugian pada orang tersebut. Untuk menghindari permasalahan etika dan hukum, sebaiknya dalam pemanfaatan teknologi *CCTV* perlu mencantumkan informasi yang dapat dilihat oleh objek/publik di tempat yang terpasang *CCTV* tersebut. Dengan kata lain, sangatlah penting mengkomunikasikan pemanfaatan teknologi

CCTV agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kesalahan persepsi dari orang/objek yang direkam.

CCTV memiliki fungsi untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya *CCTV* seringkali digunakan untuk mengawasi area publik seperti Bank, Hotel, Bandara Udara, Gudang Militer, Pabrik maupun Rumah. *CCTV* banyak digunakan diseluruh dunia sebagai alat keamanan dan pengawasan.

Pengertian *CCTV* atau kepanjangannya *Closed Circuit Television* adalah sebuah kamera video digital yang difungsikan untuk memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang yang kemudian sinyal itu akan diteruskan ke sebuah layar monitor. Fungsi *CCTV* adalah untuk memantau keadaan dalam suatu tempat, yang biasanya berkaitan dengan keamanan atau tindak kejahatan, jadi apabila terjadi hal-hal kriminal akan dapat terekam kamera yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan bukti. Pada saat-saat tertentu *CCTV* akan sangat berguna sebagai barang bukti, seperti ketika terjadi bencana besar atau peristiwa-peristiwa penting yang tidak sempat dipantau oleh manusia.

CCTV (Closed Circuit television) merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu. Pada umumnya *CCTV* seringkali digunakan untuk mengawasi area *public*. Awalnya gambar dari kamera *CCTV* hanya dikirim melalui kabel ke sebuah ruang monitor tertentu dan dibutuhkan pengawasan secara

langsung oleh operator/petugas keamanan dengan resolusi gambar yang masih rendah. Tujuan *CCTV (Closed Circuit Television)* sangat penting untuk keamanan disegala situasi, baik di Sekolah maupun tempat yang perlu pengawasan yang dianggap penting dan memantau kejadian-kejadian yang dianggap melanggar.

CCTV yang telah terpasang di wilayah Kota Makassar terdiri berbagai tipe dan spesifikasi, *CCTV* tersebut telah mampu melakukan perekaman gambar atau video tanpa henti serta data rekamannya dapat dianalisis kembali. Adapun Kriteria dasar Penempatan *CCTV* di Kota Makassar berdasarkan tingkat kerawanan sosial, tingkat kemacetan lalu lintas, nilai asset pemerintah, dampak lingkungan, dan sebagainya. Berdasarkan kriteria tersebut *CCTV* Kota Makassar sudah ada di jalan provinsi, jalan Kota, di bangunan asset pemerintah serta di lorong-lorong.

Pengadaan *CCTV* dan operasionalnya sangat mahal dan jumlah *CCTV* yang dapat dianggarkan pertahunnya masih sangat terbatas, tentunya berkolerasi dengan fungsi pemantauan *CCTV* diseluruh wilayah Kota Makassar yang belum maksimal. Maka permintaan masyarakat akan rekaman kriminalitas di beberapa sisi jalan Kota Makassar belum dapat terpantau.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian menganggap sistem *CCTV* di Makassar sebagai sistem keamanan digital atau *system digital security* yang komprehensif. Mengatakan bahwa kami sudah keliling keseluruhan Kota besar se-Indonesia, Makassar salah satunya yang memiliki sistem keamanan yang baik melalui pemasangan *CCTV* di gedung-gedung.

Tidak hanya itu, Makassar juga telah memiliki Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mewajibkan bangunan-bangunan yang nantinya difungsikan untuk ruang publik, seperti mall dan hotel untuk memasang *CCTV* private yang dapat dikoneksikan dengan ruang kontrol yang disebut *war room* milik Pemerintah Kota Makassar. *War room* menampilkan tayangan real time ratusan *CCTV* yang telah ditempatkan di titik-titik strategis untuk memantau situasi dan kegiatan masyarakat sehingga tidak ada lagi tempat bersembunyi bagi pelaku kejahatan dan pelanggar hukum. “Saat ini sudah terpasang kurang lebih 300 titik *CCTV* di Makassar dan rencananya akan dikembangkan sampai 3.000 titik. Semoga sistem *CCTV* dapat membawa ketenteraman bagi warga Makassar,” jelasnya. Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menambahkan sistem pemasangan *CCTV* juga digunakan untuk memantau dan mengatur jika nantinya ada kegiatan-kegiatan penting seperti lebaran dan tahun baru atau hal-hal penting lainnya. Insiden-insiden kecil yang terpantau melalui titik-titik *CCTV* yang tersebar di Kota Makassar. “Sistem ini memang digagas untuk menciptakan rasa aman bagi warga Kota sehingga masyarakat kita merasa terlindungi.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto kembali melakukan gerakan dibidang pemerintahan dengan menggelar uji publik draf rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar tentang Kewajiban Penyediaan dan Pemasangan *Closed Circuit Television (CCTV)* pada Bangunan Gedung disingkat Perwali *CCTV* di Ruang Sidang Perwali, Balaikota, Senin, 27 Maret 2017.

Peraturan Walikota *CCTV* ini dimaksudkan untuk mendorong dan mewajibkan kepada seluruh pemilik bangunan gedung utamanya yang komersil

untuk memasang *CCTV* yang diarahkan pada area publik demi menjaga keamanan dan ketertiban umum serta sebagai wadah untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dan bencana lainnya. Seluruh *CCTV* ini akan terintegrasi dalam sistem keamanan Kota yang terpusat di Balai Kota, Kota Makassar. Perwali *CCTV* digagas untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala bentuk kriminalitas terhadap masyarakat pada ruang publik melalui penyediaan akses pemantauan disekitar bangunan gedung.

Teknologi Operation (*war*) Room Makassar diakui Kapolri Tito paling canggih di Indonesia. Tak ada satu pun Kota di Nusantara yang memiliki sistem platform keamanan Kota berbasis digital selengkap Makassar. Operation (*war*) Room Makassar terkoneksi dengan kurang lebih 300 *CCTV* dalam Kota yang beroperasi selama 24 jam. Kamera *CCTV* Operation (*war*) Room mampu memperbesar tampilan obyek (*zoom*) hingga 4 km. *CCTV* itu juga dilengkapi dengan infra red yang mampu mendeteksi senjata tajam dari sensor suhu tubuh subjek pengamatan. Gambar yang terekam juga tajam mampu menembus kaca depan pengendara mobil sehingga wajah pengendara dapat terlihat jelas.

Data yang tertangkap oleh *CCTV* akan terekam dan disimpan dalam server yang hanya dapat diakses seizin Pemerintah Kota Makassar. Teknologi Operation (*war*) Room Makassar tidak hanya melayani kebutuhan pengamanan dalam Kota, lebih dari itu juga berfungsi mengontrol jalannya pelayanan publik di kantor-kantor pemerintah. Pemkot Makassar juga bersinergi dengan Polrestabes

Makassar dalam mendukung upaya kepolisian menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menilai pemasangan kamera pengawas *CCTV* disejumlah jalan di Makassar membantu mencegah tindak kejahatan. Karena itu, dewan mengimbau setiap tempat umum menyediakan *CCTV*. Anggota Komisi A DPRD Makassar, Zaenal Beta mengimbau agar Pemkot Makassar mengharuskan toko dan segala jenis usaha memasang alat pengintai di tempat usahanya. Hal ini, kata Dia bermanfaat mencegah kejahatan yang kerap terjadi di tempat-tempat yang tidak terduga. "Bukan hanya di jalan dipasang melainkan disejumlah lorong yang kerap terjadi tempat kejahatan paling tinggi seperti pencurian, perkelahian dan penculikan yang terjadi seperti anak kemarin, itukan di lorong.

Legislator Fraksi PAN ini juga menuturkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan berbagai pelanggaran masyarakat bisa diawasi melalui *CCTV*. *CCTV* itu juga jangan jadi pajangan saja. Dengan pemasangan itu masyarakat akan lebih hati-hati dan kejahatan akan berkurang karena mereka diawasi dengan *CCTV*. Adapun pengadaan *CCTV* hanyalah sebagai alat pengawasan. Namun, sebenarnya banyak faktor di luar itu yang seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap lingkungan seperti RT/RW setempat. Legislator Demokrat Makassar, Basdir menambahkan, pemasangan *CCTV* di jalan Kota Makassar menandai tagline Kota Makassar sebagai *Smart City*. "Tapi semua itu kita kembalikan di masyarakat, berhasil atau tidaknya penegakan hukum lalu lintas juga ditentukan dari kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Wali Kota Danny mengutarakan, jika perwali itu diterapkan maka pantauan Makassar akan lebih maksimal. Ini juga agar target 3.000 *CCTV* yang memantau Kota Makassar setiap harinya dapat tercapai. Pusat kontrol juga berada dioperational *room* Pemkot Makassar karena pusat kontrol tersebut juga sudah dikoneksikan ke Polrestabes Makassar. Wali kota Makassar Moh. Ramdhan 'Danny' Pomanto mendapat kado spesial dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Danny membangun sistem keamanan Kota dengan kamera *CCTV* yang dikontrol langsung melalui *war room*. *CCTV* Pemkot Makassar terintegrasi dengan mini war room yang ada di Polrestabes Makassar. Sistem pemantauan Kota dengan menggunakan kurang lebih dari 300 kamera *CCTV* dengan melibatkan Dinas Kominfo Makassar ini juga menjadi contoh bagi Kota-Kota lainnya di Indonesia. Pemantauan Kota dengan *CCTV* ini bertujuan salah satunya memberi informasi kemacetan jalan yang ter-update setiap saat lewat akun Twitter Dinas Kominfo Makassar.

Dalam kesempatan HUT Bhayangkara ke-71 ini Pemerintah Kota Makassar merasa sangat terhormat menjadi perwakilan Kepala Daerah yang diundang sekaligus berbangga mendapatkan penghargaan dalam pengamanan Kota melalui *CCTV* dan *War Room* dari Kapolri. Danny menerima penghargaan ini bersama beberapa anggota polisi yang juga mendapatkan penghargaan dalam bidang ketentraman dan ketertiban nasional. Kapolri memuji sistem keamanan Makassar yang berbasis *CCTV* ini terbaik se-Indonesia. Tito menyampaikan pengalamannya berkeliling di beberapa Kota besar di Indonesia. Namun menurut Tito hanya di Makassar Jenderal bintang empat ini baru menemukan sistem *CCTV*

yang sangat komprehensif dan terintegrasi dengan kepolisian. Tito memuji Danny yang mengeluarkan Peraturan Wali Kota yang mewajibkan pemilik bangunan yang nantinya difungsikan untuk ruang publik seperti pusat perbelanjaan dan hotel harus memasang kamera *CCTV* pribadi yang dikoneksikan dengan *War Room* pemerintah Kota Makassar.

Kebanyakan Kota atau Kabupaten di Indonesia yang tengah menerapkan konsep Kota pintar, biasanya dengan bebas membagi hasil pantauan kamera pengawas *CCTV* kepada masyarakat baik secara real-time maupun rekaman. Namun tidak demikian dengan Kota Makassar. Alasannya, bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, hasil gambar atau video yang didapat kamera *CCTV* bukan untuk ditonton tapi dianalisa bagaimana pergerakan, pretensi dan keadaan Kota. *CCTV* jika dibagi ke publik takutnya nanti bisa disalah-gunakan dan kita sudah bekerjasama dengan Polda, Direktur IT, dan tentara untuk menganalisa keadaan, pergerakan, dan prediksinya bagaimana itu kita analisa bukan cuma di luar liat apa yang terjadi sekarang. Kendati demikian, dia meminta warga untuk tidak khawatir dengan kualitas pengawasan yang dimiliki Pemkot Makassar karena *CCTV* yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar menggunakan implementasi PAN (Kiri-kanan) Tilt (Atas-Bawah) dan *Zooming* atau PTZ. *CCTV* jenis ini diklaim punya kemampuan lensa kamera yang sanggup menjangkau jarak berkilo-kilo meter. Dengan jarak berkilo-kilometer pun kamera bisa *zoom* sampai menembus jendela orang lain.

Pemkot dapat memantau kegiatan seisi kota melalui 115 *CCTV* yang tersebar di lokasi-lokasi strategis. *CCTV* ini belum ditambah milik provider

telekomunikasi sebanyak 23 unit dan 73 titik di jalan tol. Dari 115 *CCTV* milik Pemkot, hanya 12 unit yang berupa kamera fix. Sisanya bisa diputar-putar dan di *zoom* hingga 32 kali ukuran sesungguhnya. Salah satu yang jadi titik perhatian Pemkot adalah Lapangan Karebosi yang kerap menjadi langganan event di Kota itu. Pemasangan *CCTV* disetiap sudut Kota akan meminimalisir terjadinya masalah-masalah sosial. Seperti kejahatan, narkoba dan kebersihan lingkungan tak luput dari pemantauan. Makassar harus jauh lebih nyaman dan aman, maka dari itu anak-anak kita akan bisa berkreasi dan berpestasi di mana saja, di jalan atau pun di lorong-lorong. Dengan begitu anak-anak kita akan terhindar dari kejahatan.

Closed Circuit Television (CCTV) adalah alat perekam yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video ataupun audio. Cara kerja kamera *CCTV* yaitu mengirimkan sinyal secara tertutup lewat melalui wireless ataupun kabel. Di dalam, terhadap *motion detector*, yang merupakan fitur untuk mengurangi beban penyimpanan data. Cara kerja *motion detector* adalah mendeteksi adanya perubahan pixel. Jika terjadi sebuah gerakan, maka kamera *CCTV* menganggap nilai pixelnya berubah dan akhirnya merekam perubahan tersebut.

c. Hambatan Dan Kesulitan Dalam Penerapan *CCTV*

Pemerintah saat ini tengah gencar dalam penerapan *Smart City* di Kota Makassar. menerapkan konsep Kota cerdas. Seiring dengan itu, Kota-Kota lain pun turut mengikuti dan kini sedang dalam proses. Namun dalam proses penerapannya, terdapat sejumlah kendala yang mengakibatkan tersendatnya

proses realisasi. Berikut beberapa kendala yang menghambat proses penerapan *Smart City* di Kota Makassar.

Investasi besar Pemerintah Kota menyebutkan total nilai investasi Kota cerdas di Kota Makassar dapat mencapai (sekitar Rp 14 M). Tentunya angka tersebut sangat besar bagi Kota Makassar ingin menerapkan Kota cerdas sekaligus menggiurkan bagi yang ingin berinvestasi.

Penyediaan infrastruktur bertahap Pemerintah juga menjelaskan tahapan untuk membangun Kota cerdas. Pertama adalah pembangunan infrastruktur dasar, yaitu penyediaan internet. Salah satunya lewat pembangunan jaringan kabel fiber optik.

Setelah infrastruktur dasar selesai, pembangunan pusat pengolahan data jadi fokus berikutnya. Rampung dengan pengolahan data selesai, pemerintah bisa melanjutkan pengembangan dengan memasukkan dan mengolah data Kota yang didapat dari sensor aplikasi. Untuk kasus Kota Makassar misalnya, pemerintah Kota mengambil data lalu lintas dengan menempatkan *CCTV* yang bisa membaca kecepatan kendaraan. Serta Pemerintah Kota Makassar mengumpulkan data keluhan masyarakat lewat aplikasi *Qlue*. Pengembangan lain bisa bermacam-macam tergantung kebutuhan pemerintah. Sensor pun dipasang disungai untuk memantau debit air guna peringatan banjir, misalnya.

Perangkat langka Masalah lain yang menghambat implementasi adalah harga perangkat yang tinggi dan sulit diperoleh. Penyedia solusi teknologi Kota pintar didominasi pemain asing, sehingga perlu dana yang tak sedikit untuk

membeli perangkat tersebut. Pemain lokal pun masih sangat sedikit yang sanggup bersaing.

d. Cara Perlindungan Keamanan CCTV Kota Makassar

Pemerintah Kota Makassar melakukan berbagai hal agar perlindungan /keamanan *CCTV* tidak mudah dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pemerintah memang *CCTV* diarea tertentu seperti disudut bangunan dan diberbagai jalan-jalan tertentu seperti di Jalan dr Samratulagi, Vetran, Pettarani, urip sumoharjo serta jalan-jalan besar lainnya diberbagai wilaya Kota Makassar, tentunya kondisi ini membutuhkan keamanan prima agar masyarakat selalu merasa aman dalam berbagai aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat Kota Makassar.

Selain itu, bentuk pengamanan lain di Pasar Sentral adalah keberadaan kamera *CCTV*. Perangkat keamanan ini terpasang dibeberapa titik, baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Pemantauan segala aktivitas di pasar dapat dilakukan dengan *CCTV*.

B. Program *Smart City* Kota Makassar (Studi pemanfaatan *CCTV* di Kota Makassar)

Smart City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif Kota. Kemunculan *Smart City* merupakan hasil dari gabungan modal sumber daya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik), modal infrastruktur (contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi), modal sosial (contohnya aktifitas bisnis kreatif). Pemerintahan yang kuat dan dapat dipercaya

disertai dengan orang-orang yang kreatif dan berpikiran terbuka akan meningkatkan produktifitas lokal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu kota.

Smart City adalah salah satu program Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan “Makassar Kota Dunia Yang Nyaman Untuk Semua”. Program ini diharapkan agar masyarakat dapat mengedepankan aspek untuk keamanan Kota Makassar dalam kehidupan sehari-hari, karena tanpa dukungan masyarakat maka program *Smart City* tidak dapat berjalan dengan baik.

Setelah berjalannya program ini, tampaknya kondisi Kota Makassar masih belum banyak berubah dari segi keamanan Kota. Masih banyak ditemui kriminal jalanan meskipun pengadaan *CCTV* disejumlah ruang utama sudah terlaksana tetapi belum terealisasi dengan baik dan masih sering terjadi pencurian motor (Curanmor).

Dalam menjalankan program *Smart City* khususnya bidang keamanan Kota telah membuat instruksi kepada SKPD dan Kecamatan se-Kota Makassar utamanya Dinas Informatika Kota Makassar agar melaksanakan program yang mendukung *Smart City*. Khususnya untuk lurah, mensosialisasikan *Smart City* kepada masyarakat. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum tahu yang dimaksud dengan *Smart City* dan bagaimana persiapannya sehingga belum berdampak terhadap perubahan pola pikir masyarakatnya.

Melihat kondisi di atas wajar jika sampai saat ini program *Smart City* untuk keamanan tidak terealisasi dengan baik. Kekuatan dalam menjalankan

Smart City juga belum ada, baik Perda maupun Perwali yang membahas *Smart City* secara khusus di Kota Makassar.

Kota Makassar sebagai *Smart City* menjadi bagian dari program Pemerintah Kota sebagai bagian dari masyarakat global. Program ini tidaklah berjalan sendiri karena harus disandingkan dengan konsep kearifan lokal Makassar, yakni *Sombere* (keramahan). Dengan semangat *sombere*, maka interaksi antara pemerintah dan masyarakat semakin erat, terbangun kebersamaan, *responship*, tingkat improvisasi lebih tinggi, inisiatif dan keinginan menyelesaikan masalah sesegera mungkin, solutif, inovatif, semakin terbuka untuk melakukan perubahan, pelayanan yang mampu menggabungkan antara *gesture* (bahasa tubuh) dan lisan yang mencerminkan kecerdasan, keluhuran pekerti dan tata krama yang tinggi. Dengan demikian merekatkan antara *sombere* (*attitude*) dan pelayanan publik merupakan inovasi baru dan cara pandang baru dalam mewujudkan reformasi birokrasi, hal ini sebagai salah komponen penting penyusunan pola birokrasi yang diusung oleh Bapak walikota Makassar dan wakil walikota Makassar periode 2014-2019 dengan tagline Dua Kali tambah lebih baik ($2x+\sqrt{\quad}$), *Smart City* dan kota yang berkelas dunia (*world class*) untuk semua.

Untuk mengetahui Program *Smart City* Kota Makassar (Studi Pemanfaatan CCTV di Kota Makassar), beberapa karakteristik *Smart City* yang dikemukakan oleh Ahmad Nurmandi, 2014 : 400. Untuk mengetahui tahap yang dapat dijalankan suatu program *Smart City* yaitu:

1. Faktor manusia, Kota dengan manusia-manusia yang kreatif dalam pekerjaan, jejaring pengetahuan, lingkungan yang bebas dari Kriminal.

2. Faktor teknologi, Kota yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi.
3. Faktor kelemahan, masyarakat Kota (Pemerintah, kalangan bisnis dan penduduk).

Berikut ini, deskripsi dari hasil wawancara antara penulis dengan informan yang dikaitkan dengan karakteristik *Smart City*.

1. Faktor Manusia

Faktor manusia adalah Kota dengan manusia-manusia yang kreatif dalam pekerjaan, jejaring pengetahuan, lingkungan yang bebas dari Kriminal dalam Perencanaan *Smart City* adalah agenda global sebagai respon konseptual dan praktis terhadap berbagai krisis kota makassar yang semakin mengkhawatirkan, untuk mengembalikan hubungan antara manusia, ruang binaan dan ruang alami yang lebih harmonis, sehingga tidak saling menyakiti. Melalui *Smart City*, tujuan-tujuan pembangunan perkotaan berkelanjutan dapat dicapai secara sistematis dan bertahap dengan perspektif jangka panjang terhadap pengembangan *Smart City* mengenai faktor manusia agar program ini bisa berjalan sesuai manfaatnya hal ini berkaitan dengan yang disampaikan oleh salah satu informan dari Kepala Bagian Umum Dinas Tata Ruang Kota Makassar, tersebut mengatakan:

“Selama ini kami melihat kinerja yang cukup maksimal yang diperlihatkan oleh pihak pengelola *CCTV*, tentunya dari latar belakang pendidikan mereka tidak diragukan lagi karena memang merekalah orang-orang yang berperan penting dalam mengamati keamanan sekitar area-area yang dianggap rawan tindak kejahatannya, sistem ini memang digagas untuk menciptakan rasa aman bagi warga kota sehingga masyarakat kita merasa terlindungi. Sumber daya manusia baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna *CCTV* merupakan faktor yang turut menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan *CCTV* di Kota Makassar”. (Hasil Wawancara dengan informan DH, 08 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas menggambarkan pemahaman dari informan mengenai *Smart City* yang lebih mengarah kepada faktor manusia, selain itu dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam keamanan di Kota Makassar. Dilihat dari tingkat kriminal yang cukup banyak olehnya itu pemerintah seharusnya memaksimalkan program *Smart City* dari pihak pengelola *CCTV*, hal ini diperlukan peran pemerintah Kota Makassar khususnya Dinas Tata Ruang dan pihak kepolisian berperan penting dalam mengamati keamanan sekitar area-area yang dianggap rawan tindak kejahatannya.

Kota Makassar yang ada sekarang, pasti akan jauh berbeda. Infrastruktur kota yang lebih maju dan lengkap, menegaskan arah Makassar menuju Kota megapolitan semakin kentara. Infrastruktur jalan yang makin lengkap dengan berbagai pembangunan jalan lingkar, *fly over* dan perluasan jalan tol serta pelebaran jalan makin menegaskan kesiapan Makassar dalam menyongsong predikat sebagai Kota utama di Indonesia. Gedung-gedung pencakar langit yang menembus cakrawala Makassar, juga menegaskan bahwa Makassar benar-benar tengah bersiap tinggal landas menuju megapolitan yang sebenarnya, berdasarkan dengan disampaikannya dari informan Polrestabes mengatakan bahwa:

“Kalau kita cermat melihat sumber daya manusia yang menjalankan atau mengoperasikan *CCTV* dan lainnya, mereka sudah maksimal karena disetiap daerah yang dianggap rawan dari tindak kejahatan dan pelanggaran. Pihak pengelola *CCTV* sudah cukup maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan abdi negara dan abdi masyarakat. Penguatan dari sisi sumber daya manusia ini sangat penting untuk mendukung dan menunjang kinerja dari teknologi ini. Namun sangat disayangkan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait dengan tindak kejahatan yang terekam oleh *CCTV* ini belum cukup maksimal, dikarenakan ada beberapa faktor yaitu tidak jelasnya gambar yang terekam oleh *CCTV* sehingga membuat pihak penegak hukum sulit dalam melacak si pelaku”. (Hasil Wawancara dengan informan AA, 07 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengguna *CCTV* di Kota Makassar telah mencapai taraf maksimal karena disetiap daerah yang dianggap rawan dari tindak kejahatan dan pelanggaran. Pihak pengelola *CCTV* sudah cukup maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Makassar hal ini dibantu oleh berbagai elemen pemerintahan.

Pada tahun tahun 2008 menemukan banyak persoalan di Kota Makassar telah banyak berinvestasi dalam teknologi pengawasan video untuk melindungi produk dan mempromosikan lingkungan tempat kerja dan konsumen yang aman. Survei nasional terhadap berbagai perusahaan menemukan bahwa 75 persen memanfaatkan pengawasan *CCTV* disektor swasta, teknologi surveilans *CCTV* dioperasikan diberbagai tempat seperti di industri / manufaktur, ritel, keuangan/perbankan, transportasi dan distribusi, utilitas / komunikasi, perawatan kesehatan, sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu informan (Bripka Nasrullah Muntu) mengatakan bahwa:

“Kami dalam penggunaan *CCTV* menyebabkan penurunan kejahatan yang signifikan dengan rata-rata 16% serta efek terbesar *CCTV* ditemukan di tempat parkir, di mana kamera mengurangi kejahatan dengan rata-rata 51%. Skema *CCTV* di lingkungan publik lainnya memiliki dampak yang kecil di lihat dari signifikan secara statistik terhadap kejahatan, pengurangan 7% di pusat Kota Makassar pengurangan 23% pada pengaturan transportasi umum”. (Hasil Wawancara dengan informan NM, 07 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa pada penggunaan *CCTV* di Kota Makassar sangat membantu pihak pemerintah serta Dinas yang terkait dan terlebih lagi bagi masyarakat sipil dalam melakukan

kegiatan sehari-hari selama 24 jam dikarenakan *CCTV* mengintai berbagai kegiatan masyarakat.

Smart City yang akan dikembangkan di Kota Makassar ini merupakan pengembangan model Kota ekowisata yang berbasis teknologi informasi. Pengembangan dengan teknologi informasi ini diharapkan dapat menggenjot aspek kepariwisataan, komunikasi lintas instansi yang akan berdampak pada perkembangan perekonomian Kota Makassar juga akses informasi kepada publik, hal ini dipertegas oleh salah satu informan dari Masyarakat mengatakan bahwa:

“Saya selaku masyarakat berpendapat jika dilihat dari faktor manusianya dari program *Smart City* sebenarnya sudah memadai karena sumber daya manusia yang ada di Kota Makassar sangat banyak dari berbagai daerah berkumpul di Kota Makassar. Namun terkait dengan program *Smart City* yang di mana kemudian manusianya kurang peduli terhadap keamanan Kota Makassar, karena di Kota Makassar ini masih belum memadai mulai dari *CCTV*, tindak kriminalitas itu masyarakat kurang merespon artinya respon masyarakat kurang antar sesama”. (Hasil Wawancara dengan informan RB, 05 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa jika dilihat dari faktor manusianya dari program *Smart City* sebenarnya sudah memadai karena sumber daya manusia yang ada di Kota Makassar sangat banyak dari berbagai daerah berkumpul di Kota Makassar. Dengan hal ini Peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada salah satu informan yaitu pengguna *CCTV* (masyarakat) di Kota Makassar.

Maraknya aksi kriminal seperti begal atau kejahatan lainnya di jalanan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, membuat banyak pihak mempertanyakan sistem keamanan Kota tersebut. Penggunaan kamera *CCTV* yang berada di beberapa titik di Makassar dinilai sebagai hiasan saja. *CCTV* yang dipasang

Pemerintah Kota Makassar di Jalan raya dan lorong itu hanya hiasan saja. Fungsi sebenarnya untuk memantau dan memantau aksi kejahatan begal dan lainnya tak pernah terbukti, *CCTV* milik Pemerintah Kota ini sudah dikendalikan dari *war room* di lantai 10 Balai Kota Makassar. Ruangan tersebut sudah didesain sedemikian rupa dan didukung oleh teknologi terkini untuk melakukan pemantauan, hal ini disampaikan oleh salah satu informan masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Saya selaku masyarakat beranggapan bahwa masih kurangnya kesadaran warga Kota Makassar untuk menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Makassar ini dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang ada sehingga masih banyak yang melakukan pelanggaran hukum serta kurangnya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah Kota Makassar”. (Hasil wawancara dengan informan ZN, 05 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran warga Kota Makassar untuk menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Makassar ini dilihat dari faktor manusianya dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang ada sehingga masih banyak yang melakukan pelanggaran hukum serta kurangnya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah Kota Makassar.

Kota Makassar adalah salah satu Kota besar di Indonesia timur tidak dapat dipungkiri bahwa kriminal dan pencurian di tempat keramaian, pencuri dapat beraksi dengan leluasa bilamana tempat penuh dengan masyarakat. Kendati demikian keberadaan *CCTV* sangat berdampak pada kesiagaan karyawan untuk mengawasi pengunjung dan dengan demikian secara tidak langsung dapat merekam terjadinya pencurian, hal ini dipertegas oleh salah satu informan dari masyarakat (Dewi Kurniawati) mengatakan bahwa:

“Tanggapan saya tentang kebijakan pengadaan *CCTV* di Kota Makassar ini sudah merupakan program pemerintah yang bagus karena pemerintah setempat bisa mengamati kejadian-kejadian yang ada di daerah sekitarnya apalagi sampai sekarang tingkat kejahatan di Kota Makassar semakin hari semakin meningkat jadi mudah-mudahan dengan pengadaan *CCTV* ini akan mengurangi tingkat kejahatan di Kota Makassar yang dapat membahayakan masyarakat dan program ini adalah hal yang luar biasa, patut didukung. Saya harap program ini dapat bermanfaat bagi kita semua warga Kota Makassar.” (Hasil Wawancara dengan informan DK, 05 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan di lokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor Manusia yang dimiliki selama ini dilihat dari segi kinerja yang cukup maksimal yang diperlihatkan oleh pihak pengelola *CCTV*, tentunya dari latar belakang pendidikan mereka tidak diragukan lagi serta kalau kita cermati melihat sumber daya manusia yang menjalankan atau mengoperasikan *CCTV* dan lainnya mereka sudah maksimal karena disetiap daerah yang dianggap rawan dari tindak kejahatan serta masyarakat pun berpendapat jika dilihat dari faktor manusianya ini akan mengurangi tingkat kejahatan di Kota Makassar yang dapat membahayakan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penulis selama di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa program *Smart City* Kota Makassar dapat dikatakan bahwa dalam tahap proses penyelesaian agar dapat mewujudkan perkembangan Kota Makassar menjadi Kota dunia karena banyaknya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *Smart City* di Kota Makassar. Oleh karena itu, masyarakat dan pihak kepolisian disini harus lebih banyak berperan penting dalam ikut serta dengan program ini agar Kota Makassar bisa menjadi Kota dunia serta Pemerintah Kota pun harus ikut serta dalam hal ini karena tanpa dukungan Masyarakat dan pihak Kepolisian maka program *Smart City* tidak dapat berjalan dengan baik.

2. Faktor Teknologi

Faktor teknologi, Kota yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi, sebuah *Smart City* sangat bergantung pada *Smart computing*. *Smart computing* mengacu pada generasi baru *hardware*, *software* dan jaringan teknologi yang menyediakan system *IT* yang *real-time*. Dengan analisis yang baik dan secara mendalam dapat membantu penduduk membuat keputusan yang lebih pintar yang diringi dengan tindakan yang dapat mengoptimalkan proses bisnis.

Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa perubahan yang sangat signifikan. Manusia menciptakan teknologi dengan motivasi dan dorongan agar hidup menjadi lebih baik. Manusia terdorong untuk membuat sebuah teknologi yang dapat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Sebenarnya teknologi sudah dikenal masyarakat sejak dahulu kala. Mulai manusia mengenal tulisan tangan, kemudian berkembang tulisan dengan bantuan mesin. Sejarah mencatat, ditemukannya mesin ketik menjadi awal perkembangan teknologi membuat dokumen dan cara mengirimkan pesan kepada orang lain. Adanya penemuan listrik semakin menjadikan pekerjaan manusia semakin mudah diselesaikan. Dengan sentuhan teknologi, mesin ketik digantikan oleh komputer yang bersumber pada energi listrik dengan fungsi yang lebih kompleks lagi. Komputer yang berfungsi sebagai alat pembuat dokumen berkembang menjadi alat pemroses data dan media komunikasi yang interaktif seiring dengan adanya internet.

Saat ini peradaban baru teknologi informasi sudah memasuki era digitalisasi. Berbagai produk terkini mulai bermunculan sehingga menyebabkan istilah

masyarakat modern bergeser dan terjadi perluasan makna menjadi masyarakat digital. Dulu pelayanan menggunakan kertas dan dokumen fisik lainnya, saat ini pelayanan diupayakan dalam bentuk *paperless* dan *soft-file*. Belum lagi ketika pelayanan harus melalui berbagai prosedur yang panjang dan cenderung berbelit serta waktu yang sangat lama. Namun, saat ini dengan era digitalisasi pelayanan birokrasi maupun administrasi semakin efektif dan efisien. Seiring dengan waktu pemerintah pun mulai melirik pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan masyarakat yang lebih maksimal bahkan optimal. Implementasi sistem informasi dan teknologi komunikasi menjadi berkembang dengan sangat pesat di Dunia birokrasi dan perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mewawancarai Kepala Bagian Umum Dinas Tata Ruang Kota Makassar, tersebut mengatakan:

“Dengan adanya fasilitas ini sangat membantu para petugas yang ikut serta dalam mengawasi Kota Makassar dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dari tindak kriminal yang menurut saya melanggar lalu lintas. Serta memanfaatkan teknologi ini kami juga dapat memantau dari jauh aktifitas masyarakat setiap harinya. Hal ini juga sebagai upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien”. (Hasil Wawancara dengan informan DH, 08 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa program *Smart City* yang dikeluarkan Pemerintah Kota Makassar sangat membantu dalam pemantauan dari aktifitas masyarakat, hal ini juga dikarenakan kecanggihan teknologi sangat membantu para petugas dalam mengawasi Kota Makassar dari kejadian yang tidak diinginkan dan yang dapat merusak *CCTV*

yang ada di tempat-tempat tertentu. Dan dengan adanya kamera *CCTV* otomatis kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dapat terpantau.

Perkembangan teknologi yang semakin pintar membuat konsep *Smart* tak hanya diterapkan pada berbagai perangkat, tetapi pada berbagai sistem atau tatanan. Salah satunya yang mencuat akhir-akhir ini adalah konsep *Smart City*. Konsep yang disebut sebagai Kota pintar ini adalah konsep yang mengetengahkan sebuah tatanan Kota cerdas yang bisa berperan dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Selain itu, konsep Kota pintar ini juga memang dihadirkan sebagai jawaban untuk pengelolaan sumber daya secara efisien. Bisa dibilang, konsep Kota cerdas ini adalah integrasi informasi secara langsung dengan masyarakat perkotaan.

Pemanfaatan teknologi merupakan aspek penting dalam melihat Kota cerdas bekerja. Dalam hal ini, teknologi informasi juga digunakan dalam penyelesaian penanganan masalah keamanan di Kota Makassar. Hal tersebut juga digambarkan dari hasil wawancara peneliti dengan Polrestabes Kota Makassar, yang mengatakan:

“Fasilitas yang ada sekarang berupa teknologi sangat membantu pihak Dinas maupun Kepolisian dalam memantau masyarakat yang terkadang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan. Dan Kami akan sangat kewalahan apabila tidak ada fasilitas seperti teknologi yang dapat mendukung kesuksesan kami dalam menjaga kota Makassar. Sistem pemasangan *CCTV* juga digunakan untuk memantau dan mengatur jika nantinya ada kegiatan-kegiatan penting seperti lebaran dan tahun baru atau hal-hal penting lainnya. Insiden-insiden kecil yang terpantau melalui titik-titik *CCTV* yang tersebar di Kota Makassar”. (Hasil Wawancara dengan informan NM, 07 Desember 2017)

Hal tersebut juga senada yang dinyatakan oleh Polrestabes Kota Makassar, tersebut mengatakan:

“Pemerintah Kota Makassar telah menyabar *CCTV* kurang lebih 300 yang ada di ruas-ruas jalan Kota Makassar dengan adanya kebijakan ini masih sama dengan sebelum dan sesudah karena menurut masyarakat jika ada *CCTV* akan langsung terlihat kejadian-kejadian yang terjadi namun permasalahan ada pada bagian penempatan *CCTV* masih belum maksimal, intinya banyak kejadian-kejadian yang tidak terekam oleh *CCTV*”. (Hasil Wawancara dengan informan AA, 07 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dari ke dua informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa fasilitas yang ada sekarang berupa teknologi sangat membantu pihak Dinas Tata Ruang serta Kepolisian dalam memantau masyarakat yang terkadang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Namun menurut masyarakat disini, jika ada *CCTV* akan langsung terlihat kejadian-kejadian yang terjadi namun permasalahan ada pada bagian penempatan *CCTV* masih belum maksimal karena masih banyak kejadian-kejadian yang tidak terekam oleh *CCTV*.

Teknologi informasi merupakan sebuah pendorong utama bagi inisiatif *Smart City*. Proyek pembangunan *Smart City* dengan mengacu pada teknologi informasi dapat mengubah sejumlah peluang yang potensial, mereka dapat meningkatkan manajemen dan fungsi Kota. Namun, meskipun banyak manfaat dari teknologi tersebut dampaknya masih belum terlihat jelas, karena terdapat kesenjangan sosial bagi penduduk yang tinggal di pedesaan yang belum mendapatkan fasilitas tersebut. Maka dari itu pemerintah Kota harus banyak mempertimbangkan faktor-faktor tertentu ketika mengimplementasikan teknologi informasi yang berkaitan dengan sumber daya, kapasitas dan hal-hal yang berkaitan dengan kesenjangan sosial nantinya., hal ini disampaikan oleh salah satu informan masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya jika dilihat dari pemanfaatan *CCTV* ini sudah bagus akan tetapi ketika kita lihat dari apa yang ada sepenuhnya belum dijalankan

dengan baik misalnya masih banyaknya kriminalitas yang terjadi di Kota Makassar, itu menandakan bahwa belum maksimalnya implementasi dalam memanfaatkan teknologi yang ada di Kota Makassar ini”. (Hasil Wawancara dengan ZN, 05 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa program *Smart City* ini jika dilihat dari pemanfaatan *CCTV* sudah bagus akan tetapi ketika kita lihat dari apa yang ada sepenuhnya belum dijalankan dengan baik karena masih banyaknya kriminalitas yang terjadi di Kota Makassar dan itu menandakan bahwa memang belum maksimalnya implementasi dalam memanfaatkan teknologi yang ada.

Walikota Makassar memperkenalkan langkah pemerintah Kota untuk memudahkan pemantauan aktivitas warga yang semakin memadati Kota Makassar. Danny Pomanto perkenalkan *Smart City* sebagai salah satu syarat menuju Kota dunia serta *Smart City* memantau pemantauan segala aktifitas masyarakat. Dari hasil wawancara dari salah satu informan yaitu pengguna *CCTV* (masyarakat), mengatakan bahwa:

“Yang melatar belakangi pasti berdasar pada negara berkembang, sudah seharusnya teknologi juga harus berkembang. Pemanfaatan *CCTV* dalam kehidupan sangat bagus manfaatnya asalkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Misalnya, dalam hal keamanan, pengawasan, dan pengembangan teknologi karena dengan begitu dapat mengefesienkan waktu kita tetapi bisa memantau segala hal demi lingkungan yang bebas dari kriminal”. (Hasil Wawancara dengan informan RB, 05 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan (Rahmatia Bobby) penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota mengeluarkan pemanfaatan *CCTV* dalam kehidupan sangat bagus manfaatnya asalkan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan pemerintah Kota dapat dipercaya disertai dengan orang-orang yang

kreatif dan berpikiran terbuka akan meningkatkan produktifitas pengembangan teknologi karena dengan begitu dapat mengefesienkan waktu kita dan tetap bisa memantau segala hal demi lingkungan yang bebas dari kriminal.

Faktor teknologi yang dimiliki oleh Dinas Tata Ruang dan Polrestabes Kota Makassar yaitu dengan adanya fasilitas beberapa teknologi sangat membantu para petugas dalam mengawasi Kota Makassar dari kejadian yang tidak diinginkan serta membantu memantau masyarakat yang terkadang melakukan pelanggaran kejahatan intinya banyak kejadian-kejadian yang bisa terekam oleh *CCTV* dalam hal keamanan, pengawasan, dan pengembangan teknologi karena dengan begitu dapat mengefesienkan waktu kita tetapi bisa memantau segala hal demi lingkungan yang bebas dari kriminal, hal ini disampaikan oleh salah satu informan masyarakat mengatakan bahwa:

“Menurut kami langkah pemerintah Kota Makassar dalam pemanfaatan *CCTV* sudah bagus untuk membantu pemerintah serta pengintaian lalu lintas di tengah Kota Makassar, tetapi tidak hanya sampai disitu *CCTV* harus juga dioptimalkan untuk kepentingan lainnya seperti tempat parkir dan selain itu di daerah rawan kriminal, *CCTV* perlu dipasang di pemukiman warga untuk mendeteksi gejala-gejala yang berkembang di tengah Kota Makassar”. (Hasil wawancara dengan informan DK, 05 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa langkah pemerintah Kota Makassar dalam pemanfaatan *CCTV* sudah bagus untuk membantu pemerintah serta pengintaian lalu lintas di tengah Kota Makassar *CCTV* harus juga dioptimalkan untuk kepentingan lainnya seperti tempat parkir dan selain itu di daerah rawan kriminal di daerah Kota-Kota sekitaran wilayah Makassar.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor teknologi ini yang berbasis teknologi, komunikasi dan informasi saat ini membawa perubahan yang signifikan karena manusia menciptakan teknologi dengan motivasi dan dorongan agar hidup menjadi lebih baik. Fasilitas yang ada sekarang berupa teknologi sangat membantu pihak Dinas Tata Ruang serta Kepolisian dalam memantau masyarakat yang terkadang melakukan pelanggaran-pelanggaran serta dengan sentuhan teknologi, mesin ketik digantikan oleh komputer yang bersumber pada energi listrik dengan fungsi yang lebih kompleks lagi. Danny Pomanto memperkenalkan *Smart City* sebagai salah satu syarat menuju kota dunia serta *Smart City* memantau pemantauan segala aktifitas masyarakat. Berbagai teknologi terkini mulai bermunculan sehingga menyebabkan istilah masyarakat modern bergeser dan terjadi perluasan makna menjadi masyarakat digital.

3. Faktor kelemahan

Masyarakat Kota Makassar meskipun menggunakan sistem keamanan *CCTV* dapat memberikan manfaat dalam bentuk menangkap semua aktivitas pada video satu kelemahan utama adalah visibilitas terbatas. Sebagian besar waktu kamera ini hanya akan menangkap bagian-bagian tertentu.

Dalam kasus ini pemantauan atau aktivitas pelanggaran kejahatan sangat sulit untuk mendapatkan rekaman tanpa instalasi banyak kamera. Tidak hanya ini estetis menyenangkan bagi mata tetapi juga dapat biaya mahal untuk kebanyakan pemilik usaha kecil untuk menginstal. Mengidentifikasi perhatian sangat penting untuk memaksimalkan manfaat dari sistem keamanan *CCTV*. Tingkat kualitas

video yang diperlukan harus ditentukan dengan ruang penyimpanan dalam pikiran. Kecuali biaya tambahan ruang penyimpanan tidak masalah kemudian sering berbagai kualitas video akan cukup menengah untuk menyediakan video berkualitas yang tidak akan mengambil banyak ruang penyimpanan, hal ini di pertegas oleh salah satu informan Kepala Bagian Umum Dinas Tata Ruang menyampaikan bahwa:

“Kami tidak bisa pungkiri bahwa Kota Makassar rawan kriminal dengan adanya program pemerintah Kota Makassar, *Smart City* ini sangat membantu pihak kepolisian dalam mengatasi berbagai persoalan-persoalan kriminal dan program *Smart City* diharapkan masyarakat umum khususnya di daerah Kota Makassar, dapat merasakan kenyamanan tanpa adanya rasa takut akan tindakan kejahatan pada daerah tersebut karena terdapat *CCTV* yang selalu mengawasi”. (Hasil wawancara dengan informan DH, 08 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak bisa pungkiri Kota Makassar ini sangat rawan tindak kriminalnya dengan adanya program pemerintah Kota Makassar, *Smart City* ini sangat membantu pihak Kepolisian dalam mengatasi berbagai persoalan-persoalan kriminal dan diharapkan masyarakat umum khususnya di daerah Kota Makassar ini dapat merasakan kenyamanan tanpa adanya rasa takut akan tindakan kejahatan.

Kelemahan lain sistem *CCTV* dapat menjadi salah satu ketergantungan pada jaringan area lokal. Jika ada jaringan outages atau isu video tidak mungkin dapat disimpan pada perangkat jaringan atau kamera sendiri tidak akan dapat berkomunikasi dengan kontrol utama untuk sistem. Inilah sebabnya mengapa penting untuk memungkinkan untuk redundansi jaringan dalam hal masalah jaringan sehingga selalu ada jalan untuk kamera kembali ke sistem utama.

Karena ada kelemahan dan kerentanan dengan sistem *CCTV* perencanaan dan analisis sangat penting sebelum pelaksanaan untuk meminimalkan resiko dan memungkinkan sistem untuk merekam sebagai kegiatan yang bersangkutan sebanyak mungkin. Selama masalah ini ditangani sistem *CCTV* dapat memberikan bukti yang solid dalam hal pencurian serta melacak aktivitas Kota Makassar. Bahkan dengan kelemahan-kelemahan ini banyak pemilik usaha masih dapat menemukan bahwa salah satu sistem ini masih menawarkan nilai dan mungkin memilih untuk menerapkan satu untuk video surveillance tempat bisnis mereka.

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan penulis terhadap informan mengenai bagaimana faktor Kelemahan agar program ini bisa berjalan sesuai manfaatnya di Dinas Tata Ruang Dan Kapolrestabes Kota Makassar.

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mewancarai Polrestabes Kota Makassar, tersebut mengatakan:

“Program *Smart City* merupakan program yang diharapkan bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kota Makassar tetapi hal tersebut akan dapat terwujud apabila semua pihak bekerja sama dalam menjalankan program tersebut mulai dari Dinas Tata Ruang, Kepolisian dan Masyarakat yang merupakan objek paling penting”. (Hasil Wawancara dengan informan NM, 07 Desember 2017)

Hal senada dengan yang disampaikan oleh salah satu informan Polrestabes Kota Makassar, tersebut mengatakan :

“Bukan cuma kami saja selaku polisi yang bertanggung jawab penuh dalam program ini tetapi juga masyarakat dan Dinas harus ikut serta dalam mengawasi kesuksesan program tersebut. Karena tanpa adanya kerja sama dengan masyarakat maupun Dinas yang berhubungan dengan program ini dalam mewujudkan keamanan Kota Makassar maka otomatis program ini tidak akan berjalan dengan baik sesuai keinginan”. (Hasil Wawancara dengan informan AA, 07 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa program *Smart City* merupakan program yang diharapkan bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kota Makassar tetapi program tersebut akan dapat terwujud apabila semua pihak bekerja sama dalam menjalankan program tersebut dan bukan hanya pihak kepolisian saja yang bertanggung jawab penuh dalam program ini tetapi juga masyarakat dan Dinas harus ikut serta dalam mengawasi kesuksesan program tersebut karena tanpa adanya kerja sama maka otomatis program ini tidak akan berjalan dengan baik sesuai keinginan.

Meskipun menggunakan sistem keamanan *CCTV* dapat memberikan manfaat dalam bentuk menangkap semua aktivitas pada video satu kelemahan utama adalah visibilitas terbatas. Sebagian besar waktu kamera ini hanya akan menangkap bagian-bagian tertentu dari suatu daerah. Mengetahui bahwa kamera dibatasi untuk menangkap video dalam jarak tertentu banyak pencuri telah menjadi baik menghindari yang tertangkap di film. Dalam beberapa kasus jika kamera yang terlihat mereka hanya menonaktifkan mereka dengan memotong kabel atau menghancurkan kamera itu sendiri. Ini adalah mengapa pandangan kamera ini sering difokuskan pada bidang utama yang menjadi perhatian seperti titik masuk kubah dan area lain di mana barang berharga disimpan atau ditangani.

Pertanyaan tersebut hampir sama dengan pernyataan salah satu informan dalam penelitian ini yaitu Pengguna *CCTV* (masyarakat) di Kota Makassar. Berikut yang dikemukakan:

“Menurut saya program ini sebagai salah satu sistem keamanan yang diandalkan banyak orang karena mampu mengawasi setiap gerakan atau

kegiatan yang sedang terjadi di tempat dimana kamera *CCTV* diletakkan, dari segi kelemahannya banyak kalangan yang menjadikan fasilitas ini sebagai alat yang dapat disalah gunakan untuk menyiarkan hal-hal yang negative atau yang tidak pantas diperlihatkan oleh orang banyak”. (Hasil Wawancara dengan informan DK, 05 Desember 2017)

Pernyataan tersebut senada diungkapkan oleh salah satu pengguna *CCTV* (masyarakat), tersebut mengatakan:

“Berjalannya program *Smart City* yang dilakukan oleh Pemerintah tampaknya kondisi Kota Makassar mengalami beberapa kendala yang dihadapi dalam segi pelaksanaan dilihat dari faktor kelemahannya masih belum maksimal, misalnya masih banyak kejadian-kejadian yang tidak terekam oleh *CCTV* serta kurangnya tindakan dari pihak kepolisian artinya kurang maksimal dalam penanganan kasus yang tidak terekam oleh *CCTV*”. (Hasil Wawancara dengan informan ZN, 05 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan di lokasi penelitian dapat disimpulkan tentang menentukan faktor kelemahan yaitu diharapkan bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kota Makassar yang menjadi kelemahan program *Smart City* ini yaitu masih banyak tempat atau lokasi yang tidak terjangkau dan belum terpasang *CCTV*. Terkadang ada masyarakat yang mengambil atau merusak *CCTV* tersebut. Maka perlu pengawasan ketat dan dengan adanya *CCTV* akan lebih terjamin keamanan karena adanya pengawasan langsung.

Kota Makassar mengalami beberapa kendala yang dihadapi dalam segi pelaksanaan dilihat dari faktor kelemahannya masih belum maksimal, misalnya masih banyak kejadian-kejadian yang tidak terekam oleh *CCTV* serta kurangnya tindakan dari pihak kepolisian artinya kurang maksimal dalam penanganan kasus yang tidak terekam oleh *CCTV*. Dan banyak kalangan yang menjadikan fasilitas ini sebagai alat yang dapat disalah gunakan untuk menyiarkan hal-hal yang

negative atau yang tidak pantas diperlihatkan oleh orang banyak, kelemahan lain sistem *CCTV* dapat menjadi salah satu ketergantungan pada jaringan area lokal. Jika ada jaringan *outages* atau isu video tidak mungkin dapat disimpan pada perangkat jaringan atau kamera sendiri tidak akan dapat berkomunikasi dengan kontrol utama untuk sistem, seperti yang disampaikan oleh salah satu informan dari masyarakat (Rahmatia Bobby) mengatakan bahwa:

“Dengan adanya pemasangan *CCTV* di jalan-jalan protokol merupakan kebijakan pemerintah yang luar biasa tetapi secara umum masih banyak kelemahan dalam pengimplementasiannya salah satunya yang menjadi perbincangan hangat kurangnya tindak lanjut dari aparat penegakan hukum terkait permasalahan lalu lintas dan juga masih kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya kepedulian mengenai pelanggaran lalu lintas, ini menandakan bahwa kebijakan *CCTV* masih perlu pembenahan secara komprehensif dari seluruh stekholder mengenai kebijakan ini”. (Hasil wawancara dengan informan RB, 05 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya pemasangan *CCTV* di jalan-jalan protokol merupakan kebijakan pemerintah yang luar biasa tetapi masih banyak kelemahan dalam pengimplementasiannya yaitu yang menjadi perbincangan hangat kurangnya tindak lanjut dari aparat penegakan hukum terkait permasalahan lalu lintas dan masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa program *Smart City* diharapkan masyarakat umum khususnya di Kota Makassar, dapat merasakan kenyamanan tanpa adanya rasa takut akan tindakan kejahatan pada daerah tersebut karena terdapat *CCTV* yang selalu mengawasi dan program *Smart City* ini masih banyak tempat atau lokasi

yang tidak terjangkau dan belum terpasang *CCTV*. Terkadang ada masyarakat yang mengambil atau merusak *CCTV* tersebut maka perlu pengawasan ketat dan dengan adanya *CCTV* akan lebih terjamin keamanan karena adanya pengawasan langsung, Kota Makassar tetapi program tersebut akan dapat terwujud apabila semua pihak bekerja sama dalam menjalankan program tersebut dan bukan cuma selaku polisi saja yang bertanggung jawab penuh dalam program ini tetapi juga masyarakat dan Dinas harus ikut serta dalam mengawasi kesuksesan program tersebut karena tanpa adanya kerja sama maka otomatis program ini tidak akan berjalan dengan baik sesuai keinginan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. program *Smart City* Kota Makassar (Studi Pemanfaatan *CCTV* di Kota Makassar) maksimal sudah terlaksana dengan melihat indikator, yaitu :
 - a. Faktor manusia, dilihat dari kinerja pengelola *CCTV* yang dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan Dinas, namun jika kita melihat sumber daya manusia yang menjalankan atau mengoperasikan *CCTV* mereka sudah maksimal, serta masyarakatpun berpendapat jika dilihat dari faktor manusianya ini akan mengurangi tingkat kejahatan di Kota Makassar yang dapat membahayakan masyarakat.
 - b. Faktor Manusia dengan adanya program pemanfaatan *CCTV* yang dimiliki oleh Dinas Tata Ruang dan Polrestabes Kota Makassar dapat membantu para petugas dalam mengawasi Kota Makassar dari kejadian yang tidak diinginkan serta membantu memantau masyarakat yang terkadang melakukan pelanggaran kejahatan tindak kriminal.
 - c. Faktor kelemahan yaitu diharapkan bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kota Makassar yang menjadi kelemahan program *Smart City* ini yaitu masih banyak tempat atau lokasi yang tidak terjangkau dalam pemasangan *CCTV* perlu juga pengawasan yang ketat

dari pihak Dinas dan Kepolisian agar *CCTV* lebih terjamin keamanannya karena adanya pengawasan langsung dari pihak yang terkait.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan dari hasil penelitian yang dilakukan selama penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap pemanfaatan *CCTV* di Kota Makassar masih perlu ditingkatkan dan harus digunakan dengan sebagaimana mestinya agar menciptakan rasa nyaman bagi masyarakat Kota Makassar sehingga program *Smart City* dapat terlaksana dengan baik.
2. Perlunya peningkatan koordinasi yang baik antara Dinas dan pihak Kepolisian sehingga program *Smart City* dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Baik Dinas maupun Kepolisian perlu meningkatkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemanfaatan *CCTV* agar tidak terjadi kesalahpahaman.
4. Hendaknya memberikan pembinaan khusus bagi masyarakat yang terlibat sebagai pelaksana dari program *Smart City* yang dikeluarkan oleh Dinas tata Ruang.

DAFTAR PUSTAKA

- Allwinkle, sam & Cruickshank, Peter (2010). Creating Smart-er Cities: An Overview, *Journal of Urban Technology*, Vol 18, No. 2, April 2011, 1-16. Routledge.
- Adam, F., Thiam S,C., and Yahya, S. 2013. Bio-template Synthesis of SilikaRuthenium Catalyst of Benzylolation of Toluene. *Journal of Physical Science*. Vol. 24. No. 1. Pp. 29-35.
- Agus Eka Pratama, 2014. *Smart City* Beserta Teknologi-Teknologi Pendukung Lainnya. Bandung : Informatika
- Ahmad, Irfan & Marini Wulandari. 2015.Kelembagaan e-Government sebagai Pendukung Smart Governance. Jakarta : Balai IPTEKnet.
- Agus suprijono. 2009. *Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ardilla, Dini. 2015.Kota Bandung Masih Jauh Bila Ingin Disebut 'Smart City'. Bandung: Galamedia News.
- Asmadi. 2005. *Konsep Dasar Kebutuhan akan Keamanan*. Jakarta: Buku kedokteran EGC
- Evarida, Yustina. 2009. Pengaruh Pengawasan dengan Menggunakan CCTV thd Disiplin Kerja Karyawan pd PT. Bank SUMUT kantor Pusat Medan. Skripsi. Medan. Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2007, hal. 7.
- Fatmawati, I. 2009. *Kebutuhan Keamanan fisik (biologic safety) pada Klien dengan proses pendekatan* diakses 22 juni 2009 dari <http://www.innapni.or.id>.
- Hasan, A. M. (2016, July, 27). CCTV: Antara Fungsi, Privasi, dan Kontroversi. Retrieved January 18, 2018, from <https://tirto.id/cctv-antara-fungsi-privasi-dan-kontroversi-bwmJ>.
- Hendro, Muliarto. 2015. Konsep Smart City; Smart Mobility. Bandung : SAFFK-MPWK ITB
- Kourtit, karima & Nijkamp, Peter (2012). Smart cities in the innovation age. *The European Journal of Social Science Research*, Vol. 25, juni 2012, 93-95. Routledge

- Kompasiana*.2014.*Prime Access Card, Smart Card for Smart City*.
(http://www.kompasiana.com/widyatharjono/prime-access-cardsmart-ard-for-smart-city_54f35f457455137c2b6c738f)
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2006, hal. 7
- Nurmandi, Achmad. 2014, **Manajemen Perkotaan**, JKSG, Yogyakarta
- Philips, Coretta. 2001. A Review Of CCTV Evaluations: Crime Reduction Effects and Attitudes Towards Its Use. *Crime Prevention Studies*, Volume 10, pp.123-155.
- Perda Kota Makassar No.5 tahun 2014 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar tahun 2014-2019
- Schaffers, Hans (2010) *Smart Cities and Future Internet : Towards Collaboration Models for Open and User Driven Innovation Ecosystem*, FIA Ghent, “Smart Cities and Future Internet Experimentation”, Desember 16th 2010
- Sanjaya, Imam. (2012). Pengukuran Kualitas Layanan Website Kementerian KOMINHO dengan Menggunakan Metode Webqual 4.0. *Jurnal Penelitian IPTEK-KOM*, Volume 14, o. 1, Juni 2012, pp. 1-14.
- Sinambella, L.P. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan dan Implementasi, Cetakan Kelima*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono.2012.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- S. Lady, “Pengaruh Model Jaringan Terhadap Optimasi Routing Open Shortest Path First (OSPF)”, *Jurnal Skripsi Jurusan Informatika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2011*
- Sudaryono.2014. *Konsep Smart City untuk Kota-Kota di Indonesia. Magister Perencanaan Kota dan Daerah UGM*.
- Thomas Dye, “Understanding Public policy”, dalam, kebijakan public. (Jakarta : Yayasan Pancur siwah. 2002), hal. 21
- Tarwoto dan wartonah. 2010. *Kebutuhan Dasar Manusia dan Keamanan fisik (biologic safety)*. Jakarta: Salemba Medika.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah